



KEBIJAKAN DAN PERSPEKTIF PEMERINTAH PUSAT TENTANG IMPLEMENTASI SDGs

Subandi Sardjoko

**Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan
Kementerian PPN/Bappenas**

Mataram, 7 Maret 2017

Disampaikan pada Lokakarya Pencapaian MDGs dan Tantangan Menuju SDGs

OUTLINE

- I. Kemajuan MDGs Di NTB**
- II. Dari MDGs Menuju SDGs**
- III. Kerangka Pelaksanaan SDGs di Indonesia**
- IV. Rencana Pelaksanaa dan Keluaran TPB/SDGS Indonesia Tahun 2017**

I. KEMAJUAN MDGs di NTB

PENGHARGAAN MDGs Tahun 2014

NO	KATEGORI	JUARA	PROVINSI PENERIMA PENGHARGAAN
1.	Pencapaian Indikator MDGs Terbanyak tahun 2011-2013	Terbaik 1 Terbaik 2 Terbaik 3	Nusa Tenggara Barat DI Yogyakarta DKI Jakarta
2.	Laju Pencapaian MDGs Terbaik Tahun 2011-2013	Terbaik 1 Terbaik 2 Terbaik 3	Nusa Tenggara Barat Sulawesi Tenggara Papua Barat
3.	Tingkat Pencapaian MDGs Terbaik Tahun 2013	Terbaik 1 Terbaik 2 Terbaik 3	DI Yogyakarta Bali DKI Jakarta
4.	Pengentasan Kemiskinan Terbaik Tahun 2011-2013	Terbaik 1 Terbaik 2 Terbaik 3	Papua Barat Papua Maluku Utara

PENGHARGAAN MDGs Tahun 2015-2016

KATEGORI PENGHARGAAN		POSISI	TAHUN 2015	TAHUN 2016
1	Tingkat Pencapaian MDGs Tertinggi Tahun 2015	Terbaik I	DKI Jakarta	DKI Jakarta
		Terbaik II	DI Yogyakarta	Bali
		Terbaik III	Bali	DI Yogyakarta
2	Laju Pencapaian MDGs Terbaik Tahun 2013-2015	Terbaik I	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Barat
		Terbaik II	DKI Jakarta	Gorontalo
		Terbaik III	Jawa Tengah	Aceh
3	Pengentasan Kemiskinan Terbaik Tahun 2013-2015	Terbaik I	Papua	Sulawesi Tengah
		Terbaik II	Sulawesi Tengah	Maluku
		Terbaik III	DI Yogyakarta	Papua Barat
4	Pencapaian Indikator MDGs Terbaik Tahun 2013-2015	Terbaik I	DKI Jakarta	DKI Jakarta
		Terbaik II	DI Yogyakarta	Bali
		Terbaik III	Nusa Tenggara Barat	Gorontalo

INDIKATOR & SUMBER DATA 2016

GOAL	INDIKATOR MDGs	INDIKATOR		SUMBER DATA
Goal 1	1.1	1	Persentase Penduduk Miskin	BPS
	1.2	2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	BPS
	1.9	3	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (<1400 kkal)	BPS
Goal 2	2.1	4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada Usia Sekolah SMP/MTs	BPS
Goal 3	3.1	5	Rasio APS Perempuan/Laki-laki di Usia Sekolah Menengah (SMP/MTs)	BPS
	3.2	6	Kontribusi perempuan dalam pekerja upahan di sektor non pertanian (KPPNP)	BPS
Goal 4	4.3	7	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	BPS
Goal 5	5.2	8	Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih	BPS
	5.3	9	Angka Pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah 15-49, cara modern	BPS
Goal 6	6.9	10	Case Notification Rate (CNR) TB	Laporan KemenKes
Goal 7	7.8	11	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak,	BPS
	7.9	12	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar	BPS

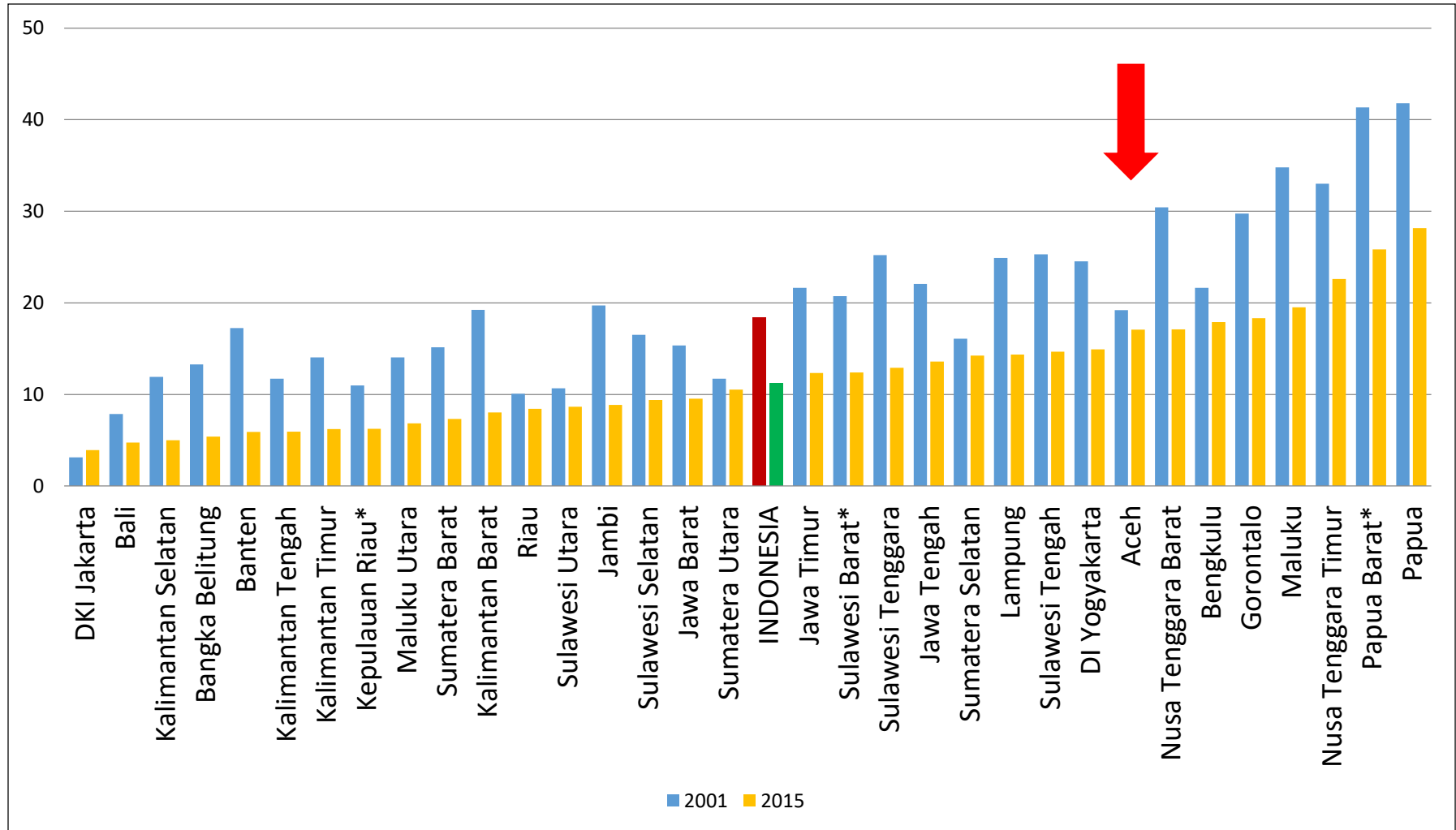


TUJUAN 1: MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN

Indikator	Acuan Dasar	Data Terbaru	Target MDGs 2015	Status	Sumber	
TUJUAN 1. MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN						
Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990-2015						
1.1	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari	20.60% (1990)	5.90%	10.30%	●	Bank Dunia dan BPS
1.1a	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional	15.10% (1990)	11,22% (2015)	7,55%	▼	BPS, Susenas
1.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	2.70% (1990)	1,97% (2015)	Berkurang	●	BPS, Susenas

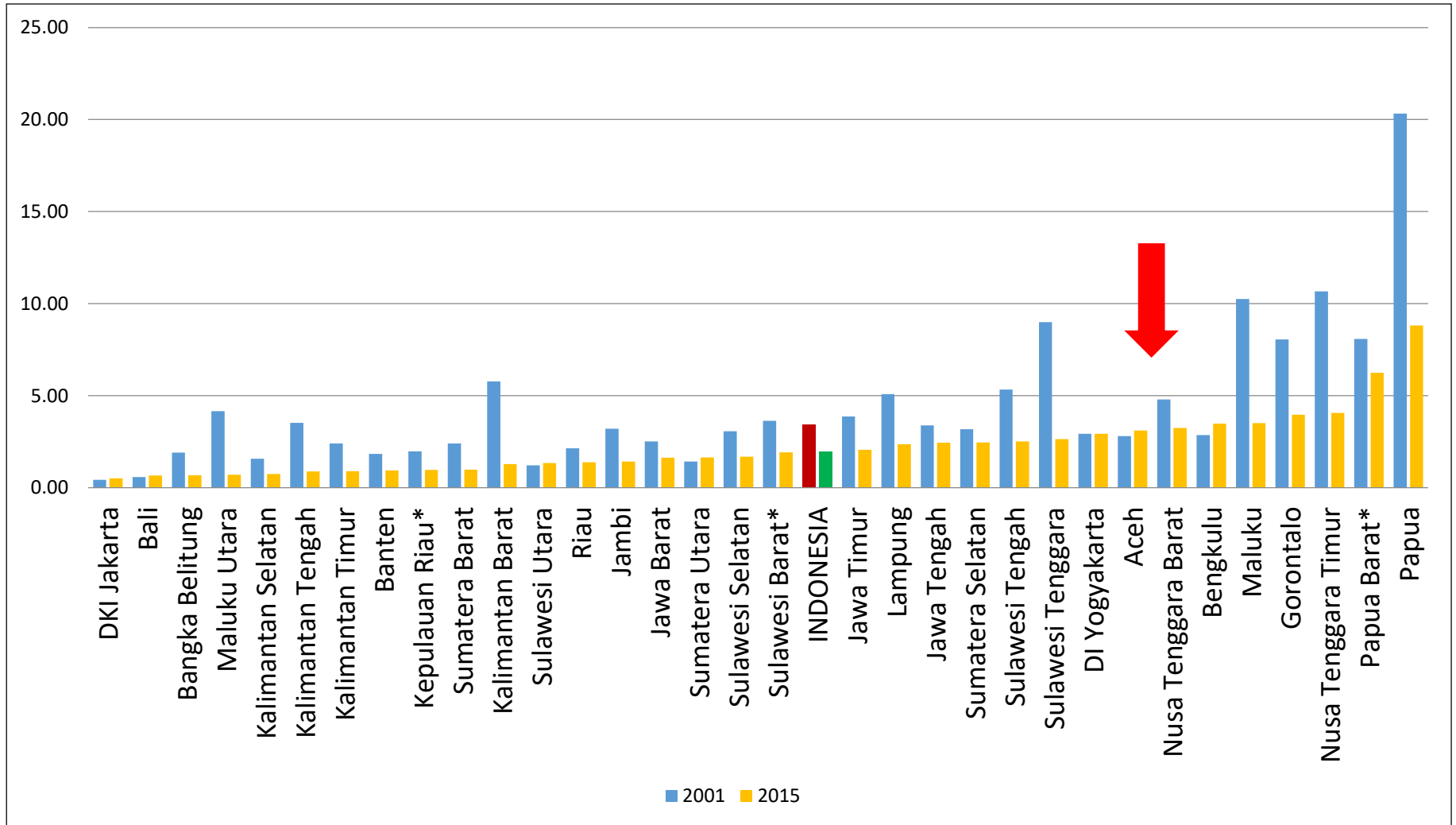
Status : ● Sudah Tercapai ▼ Tidak Tercapai

Tingkat Kemiskinan Menurut Provinsi, Tahun 2001 dan 2015



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2001, 2015

Tingkat Kedalaman Kemiskinan Menurut Provinsi, Tahun 2001 dan 2014



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2001, 2015



1

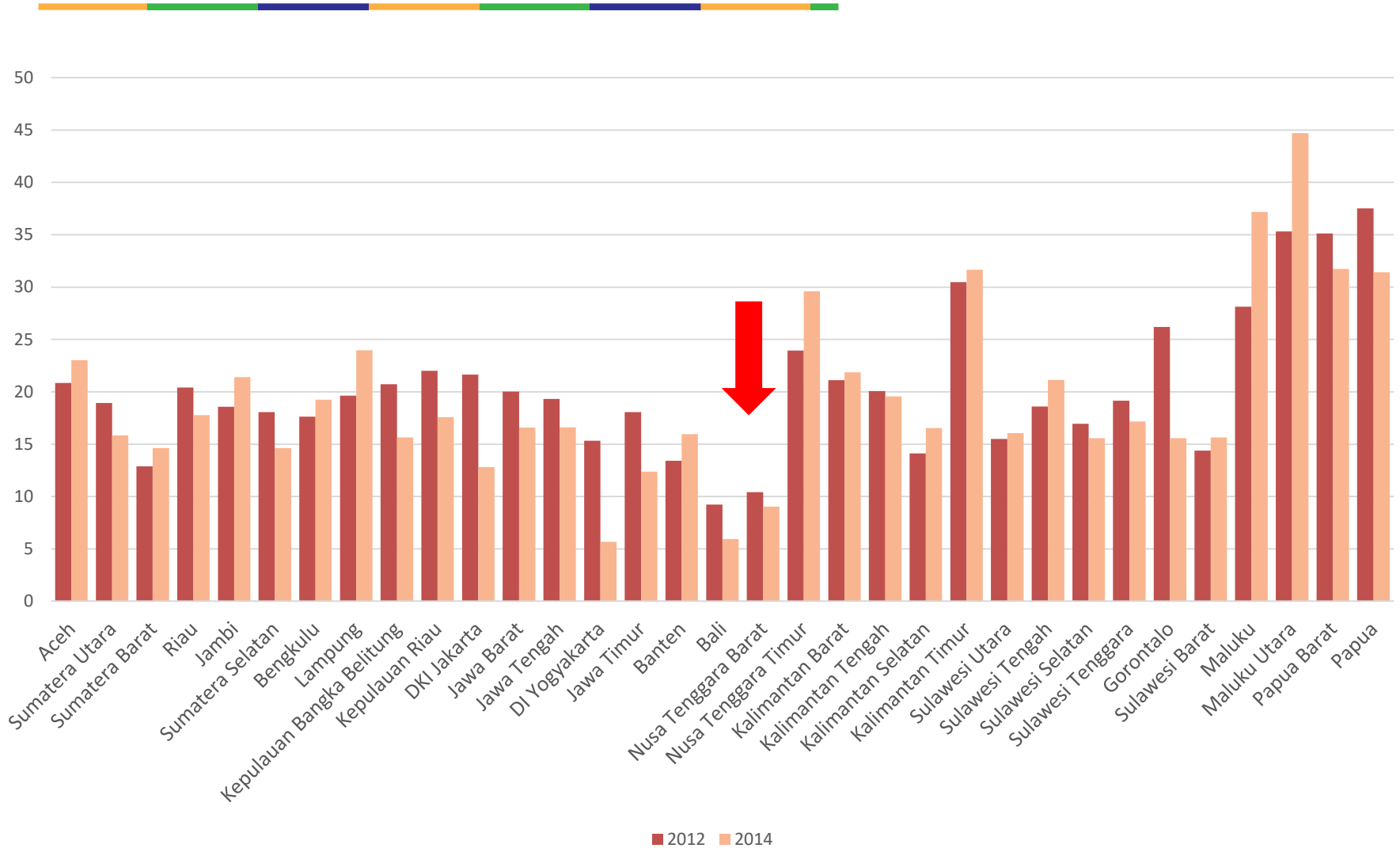
ERADICATE
EXTREME POVERTY
AND HUNGER

TUJUAN 1: MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN

Indikator	Acuan Dasar	Data Terbaru	Target MDGs 2015	Status	Sumber
TUJUAN 1. MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN					
Target 1B: Menciptakan Kesempatan Kerja Penuh dan Produktif dan Pekerjaan yang Layak Untuk Semua, Termasuk Perempuan dan Kaum Muda					
1.4	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja*	3,52% (1990)	3,31% (2014)	-	Bank Dunia dan BPS
1.5	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	65% (1990)	61.70%	-	BPS, Susenas
1.7	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja**	71% (1990)	41.91% (2015)	Menurun	● BPS, Susenas

Status : ● Sudah Tercapai ▼ Tidak Tercapai

Proporsi Penduduk dengan Asupan Kalori Di Bawah Tingkat Konsumsi Minimum - 1.400 Kkal/Kapita/Hari Menurut Provinsi, 2013 Dan 2014



TUJUAN 1: MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN



Indikator	Acuan Dasar	Data Terbaru	Target MDGs 2015	Status	Sumber	
TUJUAN 1. MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN						
Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015						
1.8	Prevalensi balita dengan berat badan rendah / kekurangan gizi	31,0% (1989)*	19,60% (2013) **	15,50%	▼	* BPS, Susenas **Kemenkes, Riskesdas
1.8a	Prevalensi balita gizi buruk	7,2% (1989)*	5,70% (2013) **	3,60%	▼	
1.8b	Prevalensi balita gizi kurang	23,8% (1989)*	13,90% (2013) **	11,90%	▼	
1.9	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum:				▼	BPS, Susenas
	- 1400 Kkal/kapita/hari	17,00% (1990)	12.96% (2015)	8,50%	▼	
	- 2000 Kkal/kapita/hari	64,21% (1990)	56.94% (2015)	35,32%	▼	

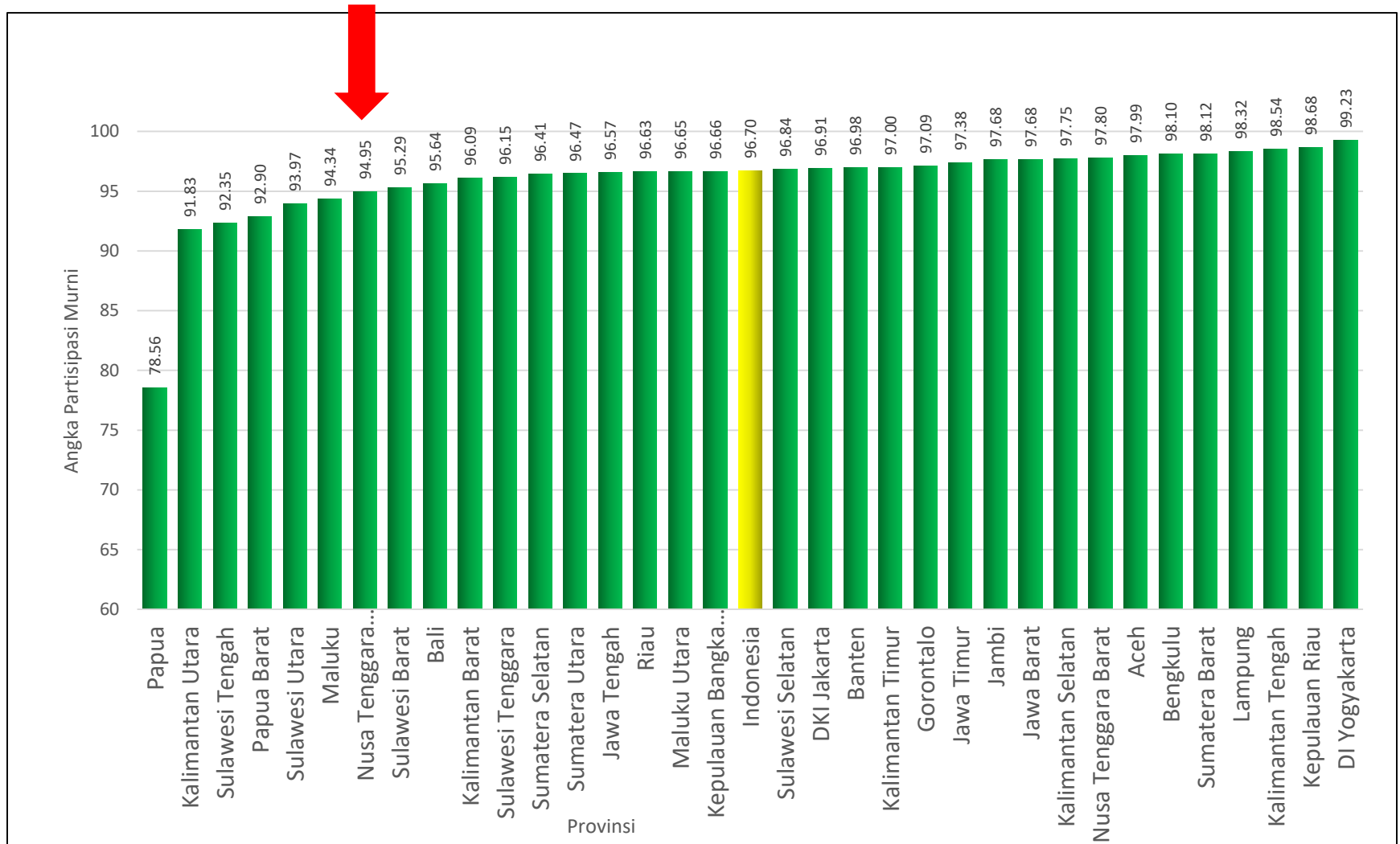
Status : ● Sudah Tercapai ▼ Tidak Tercapai

TUJUAN 2: MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA



Indikator	Acuan Dasar	Data Terbaru	Target MDGs 2015	Status	Sumber
TUJUAN 2: MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA					
Target 2A: Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan di manapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar					
2.1	Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/ sederajat	88,70% (1990)*	96,70 (2015)	100%	● *BPS, Susenas
2.2	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan SD	62,00% (1990)	88.94% (2014/2015)	100%	▼ Kemdikbud
2.3.	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	96,60% (1990)	99.67 (2015) L: 99.71% P: 83.84%	100%	● BPS, Susenas

APM-SD/MI menurut Provinsi, 2015

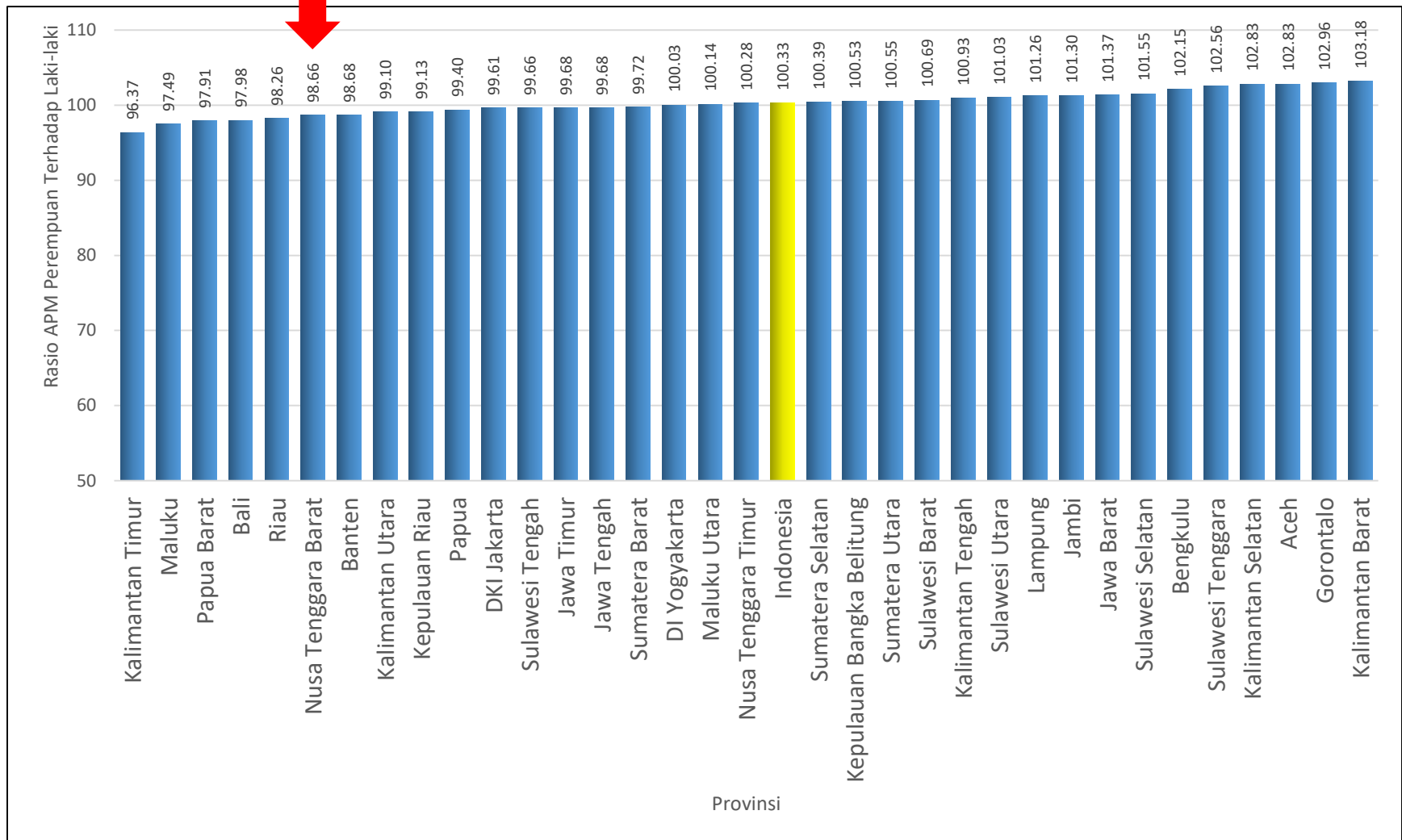




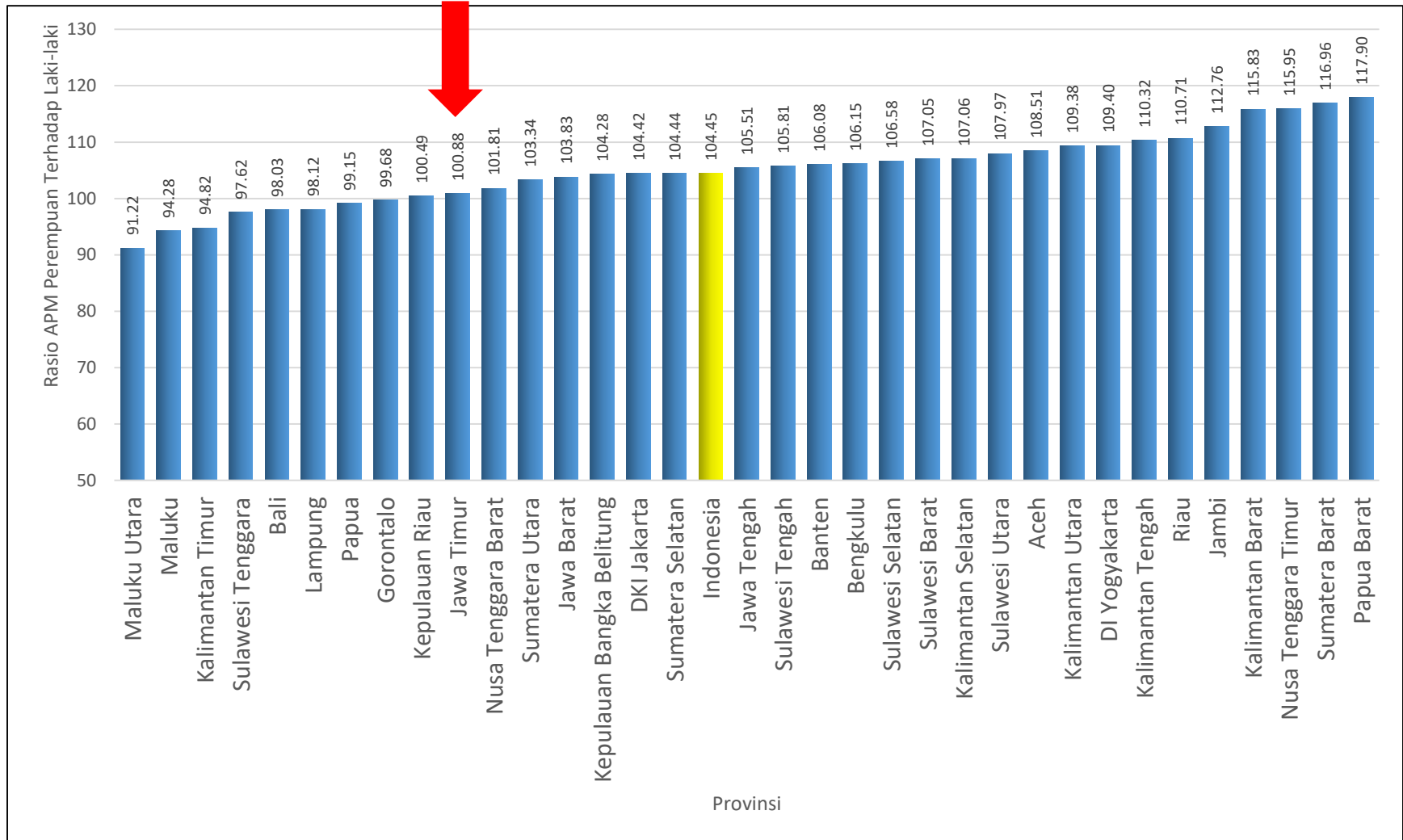
TUJUAN 3: MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

	Indikator	Acuan Dasar	Data Terbaru	Target MDGs 2015	Status	Sumber
TUJUAN 3: MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						
Target 3A: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015						
3.1	Rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi					
	- Rasio APM perempuan/ laki-laki di SD	100.27 (1993)	100,40% (2015)	100,0%	●	BPS, Susenas
	- Rasio APM perempuan/ laki-laki di SMP	99.86 (1993)	104,52% (2015)	100,0%	●	
	- Rasio APM perempuan/ laki-laki di SMA	93.67 (1993)	104,44% (2015)	100,0%	●	
	- Rasio APM perempuan/ laki-laki di Perguruan Tinggi	74.06 (1993)	122,14% (2015)	100,0%	▼	
3.1a	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	98.44 (1993)	99,93% (2015)	100,0%	●	
3.2	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian	29.24% (1990)	35,77% (2015)	Meningkat	●	BPS, Sakernas
3.3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	12.50% (1990)	17,3 % (2014)	Meningkat	●	KPU

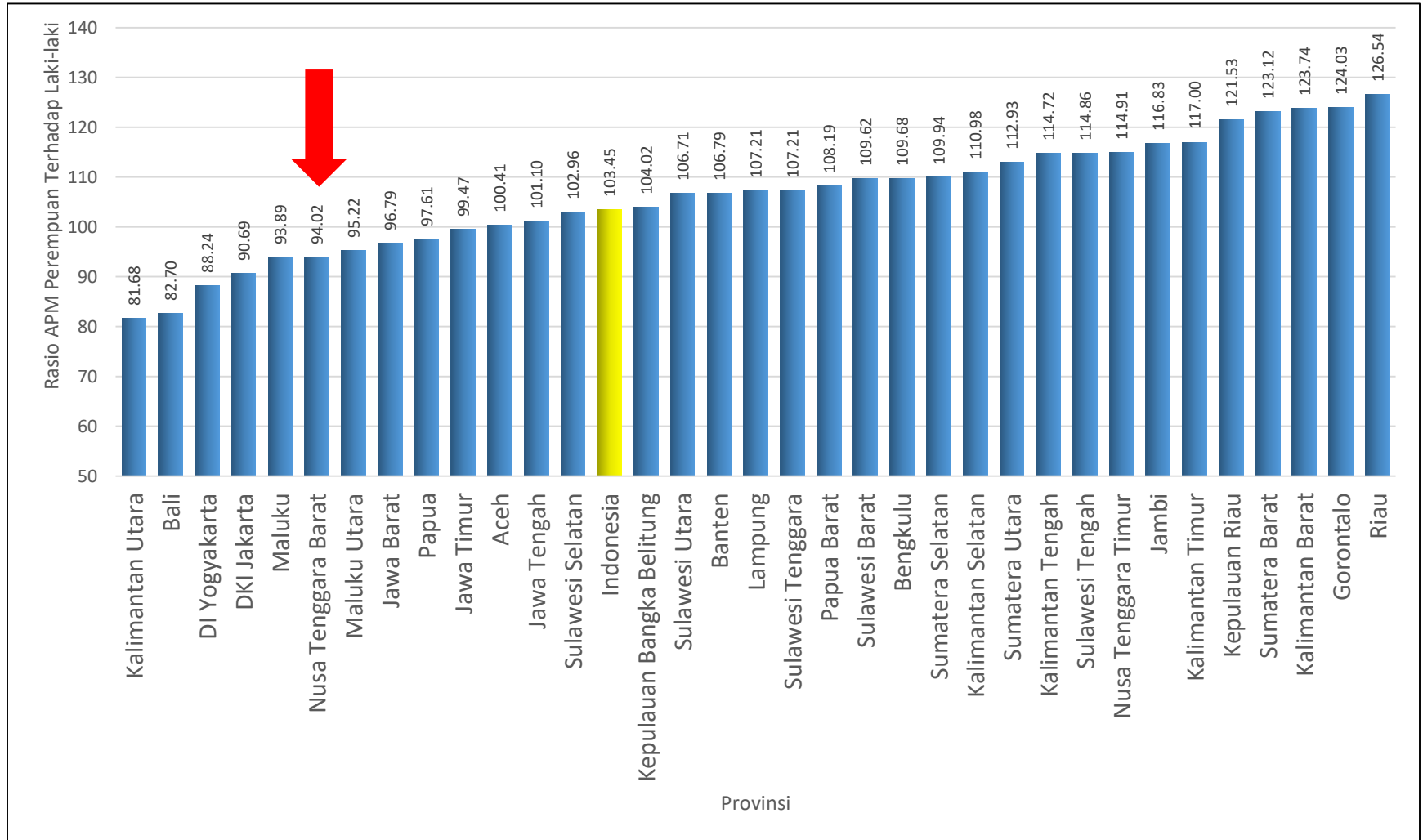
Rasio APM-SD/MI Perempuan dan Laki-Laki menurut Provinsi, 2015



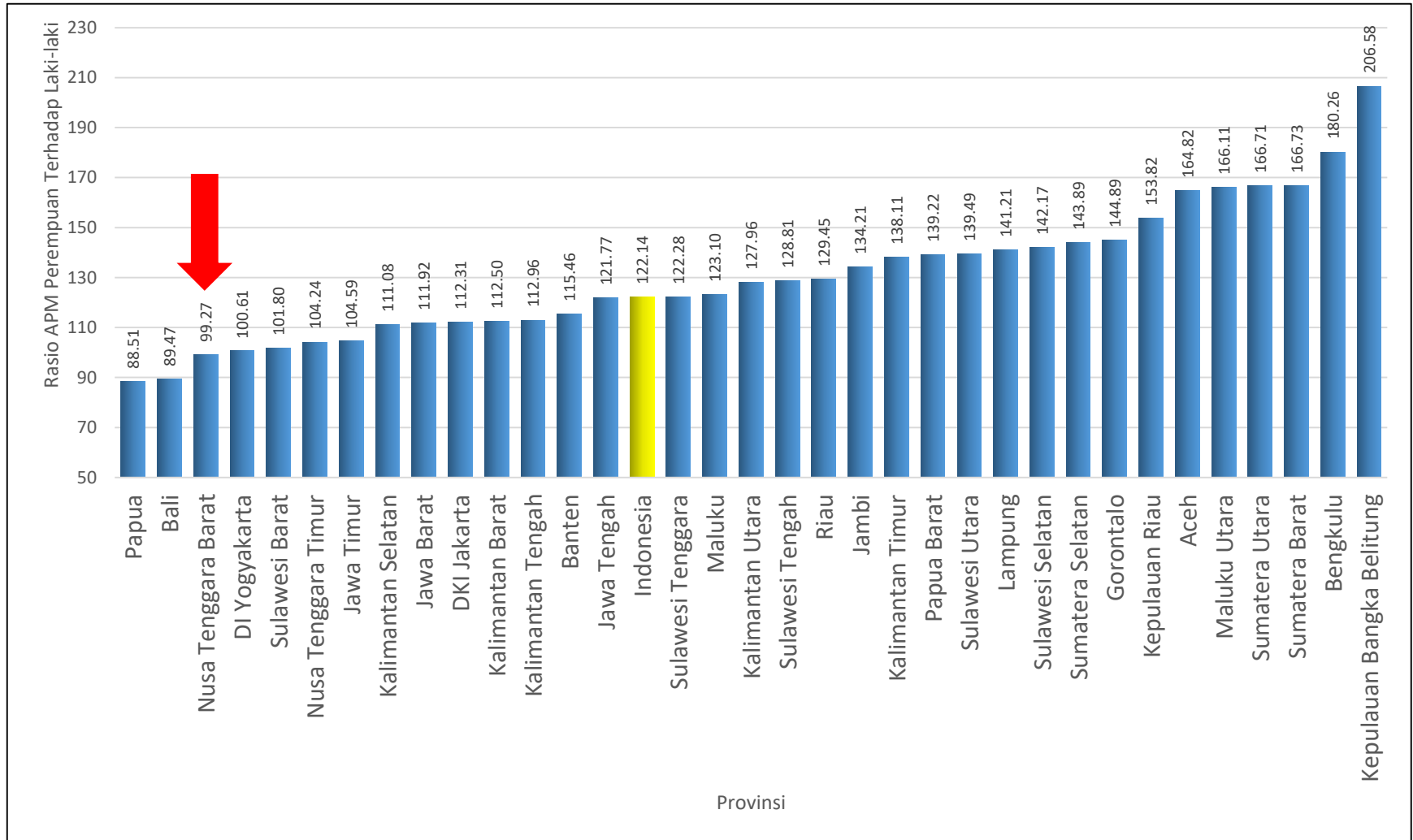
Rasio APM-SMP/MTs Perempuan dan Laki-Laki menurut Provinsi, 2015



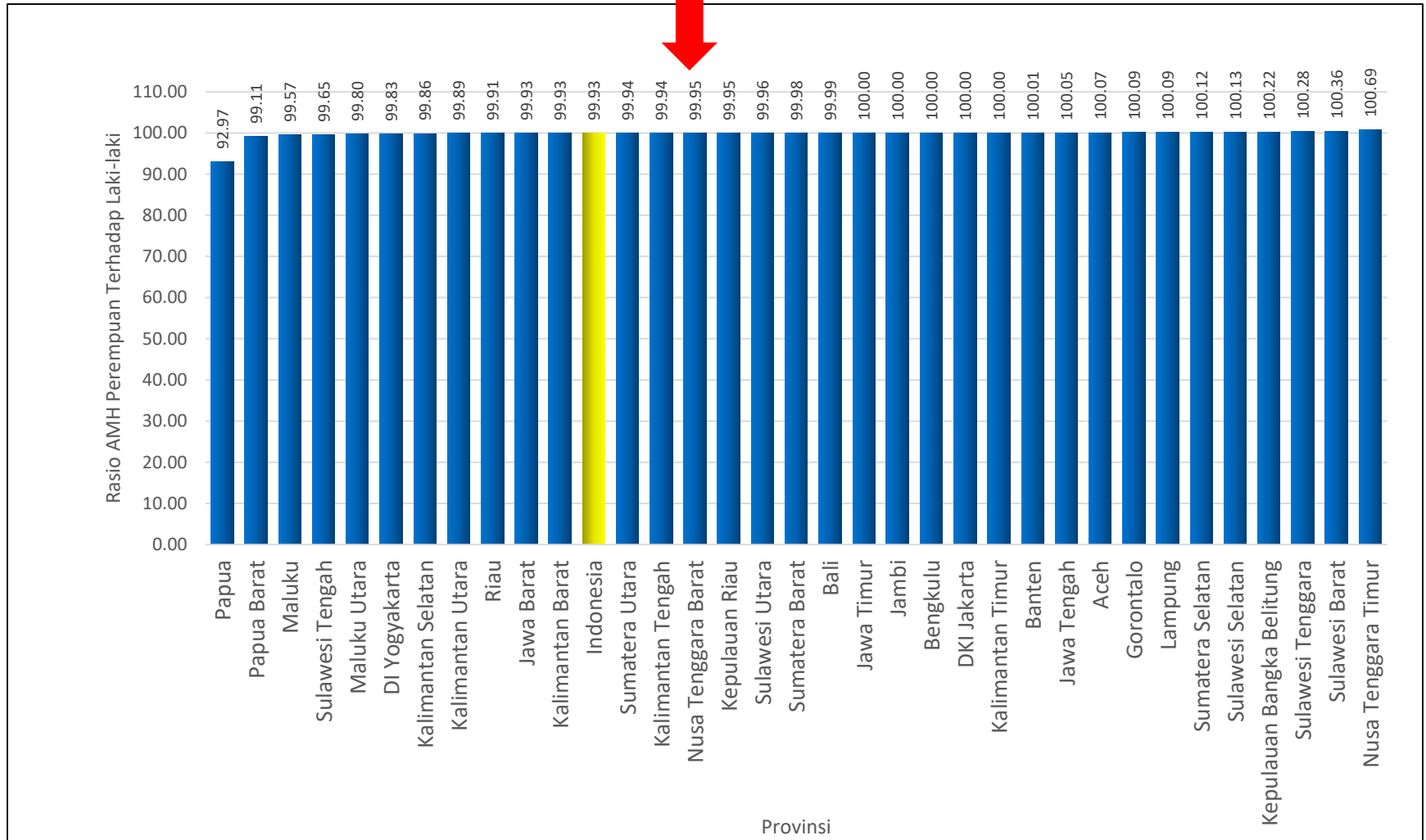
Rasio APM-SMA/SMK/MA Perempuan dan Laki-Laki menurut Provinsi, 2015



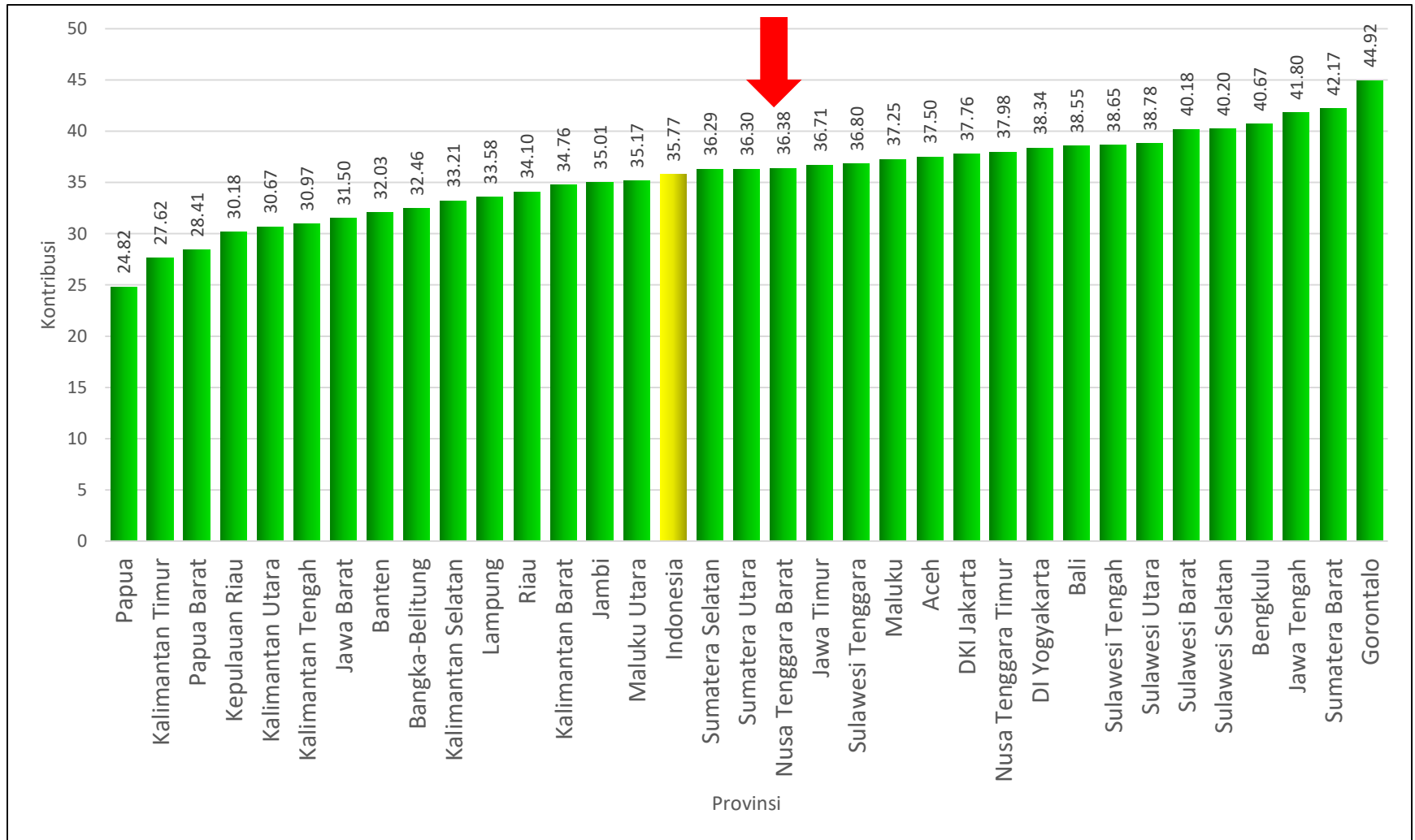
Rasio APM-PT Perempuan dan Laki-Laki menurut Provinsi, 2015



Rasio AMH Penduduk Berusia 15-24 Tahun menurut Provinsi, 2015



Kontribusi Perempuan pada Pekerjaan Upahan di Sektor Non-pertanian menurut Provinsi, Tahun 2015



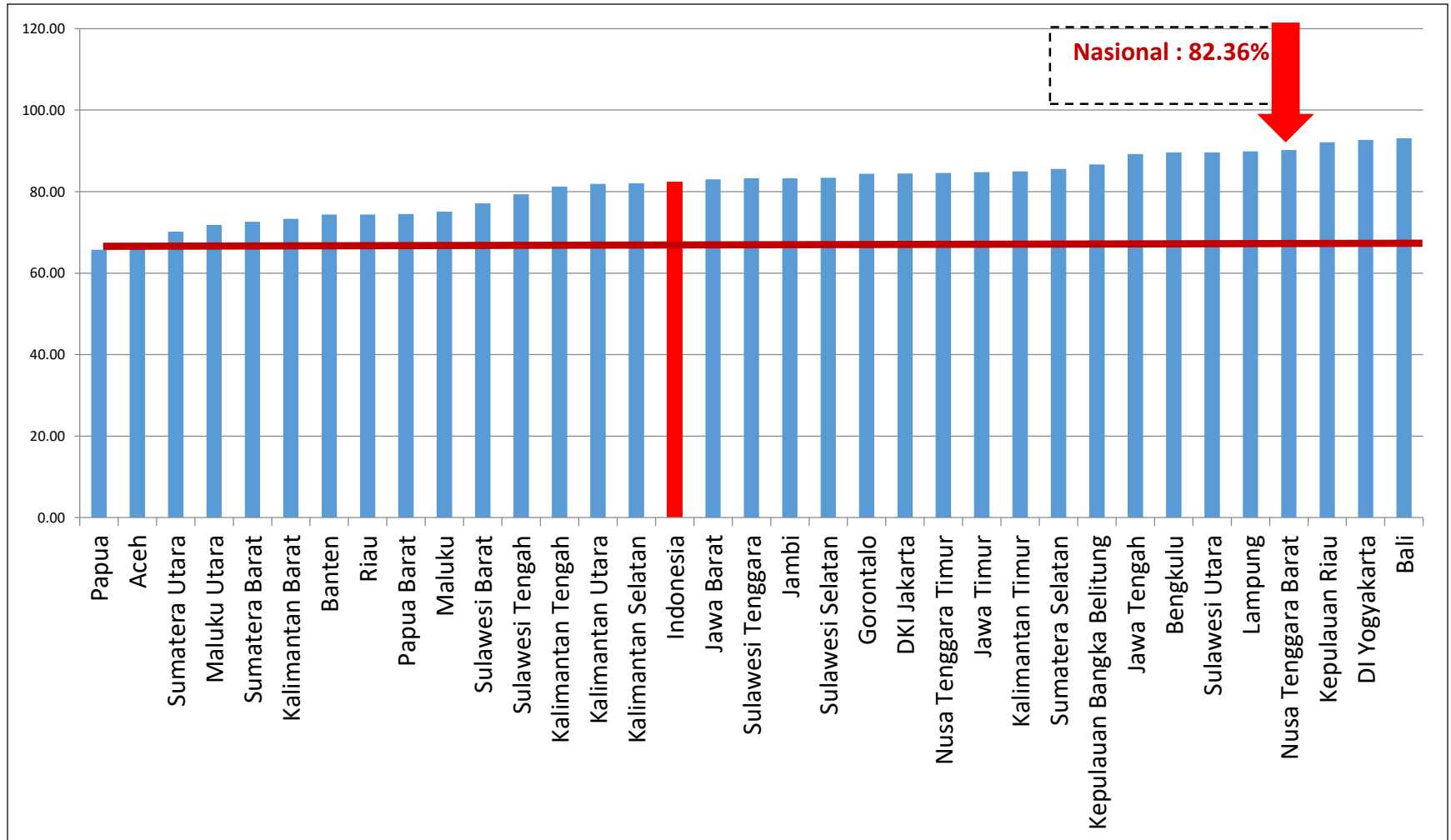


TUJUAN 4: MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK

Indikator		Acuan Dasar	Data Terbaru	Target MDGs 2015	Status	Sumber
TUJUAN 4: MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK						
Target 4A: Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990-2015						
4.1	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	97 (1991)	26.29 (2015)*	32 (2015)	●	BPS, SDKI *SUPAS 2015
4.2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	68 (1991)	22.23 (2015)*	23 (2015)	●	
4.2a	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	32 (1991)	19 (2012)	Menurun	●	
4.3	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	44,5% (1991)	82.36 (2015)	Meningkat	●	BPS, Susenas 2012-2014 Triwulan iii

Status : ● Sudah Tercapai ▼ Tidak Tercapai

Cakupan Imunisasi Campak Menurut Provinsi Tahun 2015



Sumber: BPS, 2015

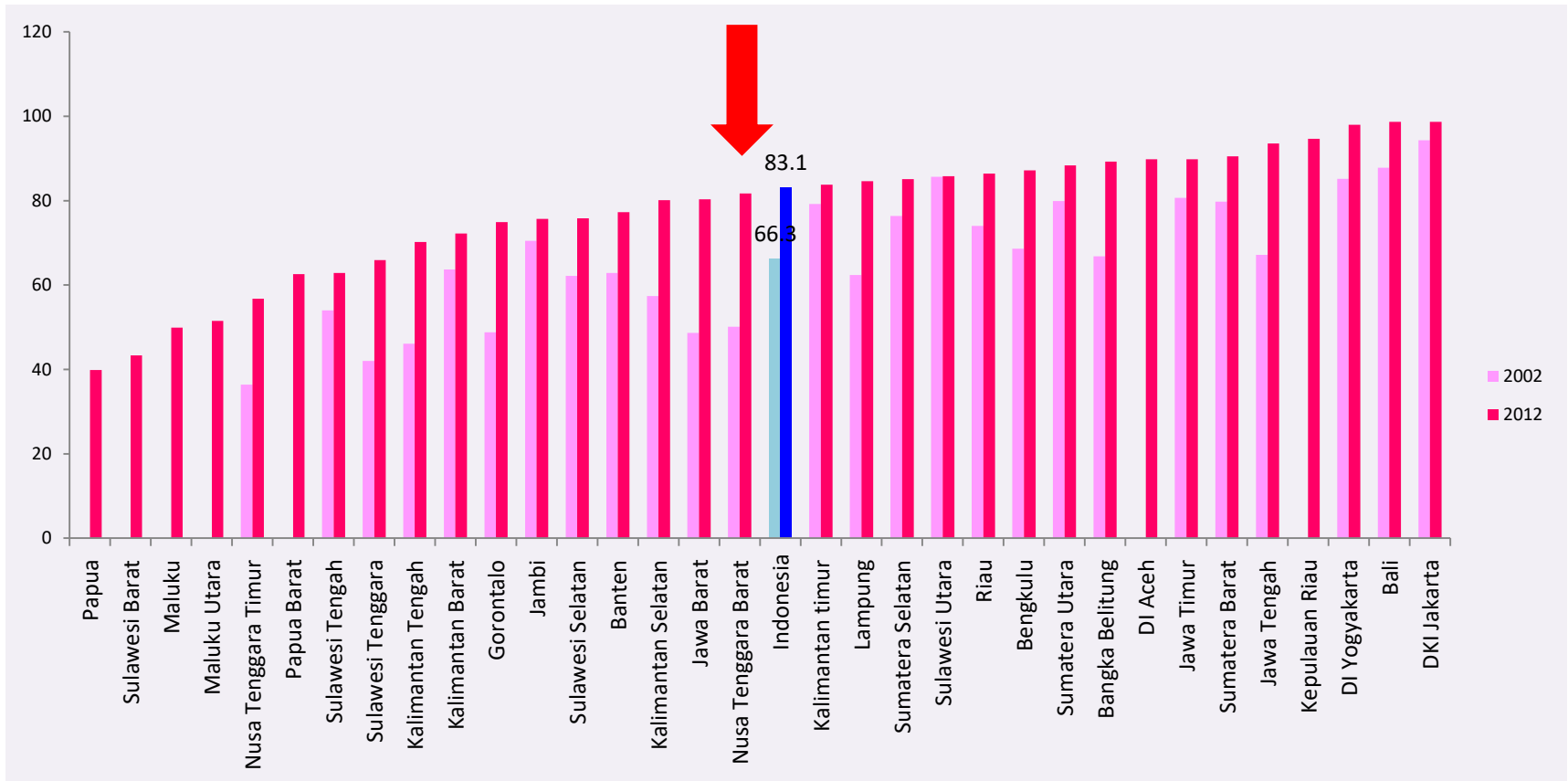


TUJUAN 5: MENINGKATKAN KESEHATAN IBU

Indikator		Acuan Dasar	Data Terbaru	Target MDGs 2015	Status	Sumber
TUJUAN 5: MENINGKATKAN KESEHATAN IBU						
Target 5A: Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990-2015						
5.1	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	390 (1991)	305 (2015)*	102	▼	SDKI *SUPAS 2015
5.2	Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih	40,70% (1992)	91,51% (2015)*	Meningkat	●	SDKI, * BPS, Susenas
Target 5B: Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015						
5.3	Angka pemakaian kontrasepsi /CPR bagi perempuan menikah usia 15-49, semua cara	49,7% (1991)	59,98% (2015)*	Meningkat	●	BPS, SDKI 1991, 2012
5.3a	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) pada perempuan menikah usia 15-49 tahun saat ini, cara modern	47,1% (1991)	58,99% (2015)*	Meningkat	●	
5.4	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun	67 (1991)	48 (2012)	Menurun	●	
5.5	Cakupan pelayanan Antenatal (sedikitnya satu kali kunjungan dan empat kali kunjungan)				●	
	- 1 kunjungan:	75,0%	93,76 % (2014)	Meningkat	●	
	- 4 kunjungan:	56,0% (1991)	85,72% (2014)	Meningkat	●	
5.6	Unmet Need (kebutuhan keluarga berencana/KB yang tidak terpenuhi)	12,70% (1991)	11,4% (2012)	Menurun	●	

Status : ● Sudah Tercapai ▼ Tidak Tercapai

Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Berdasarkan Provinsi (SDKI 2002-2012)



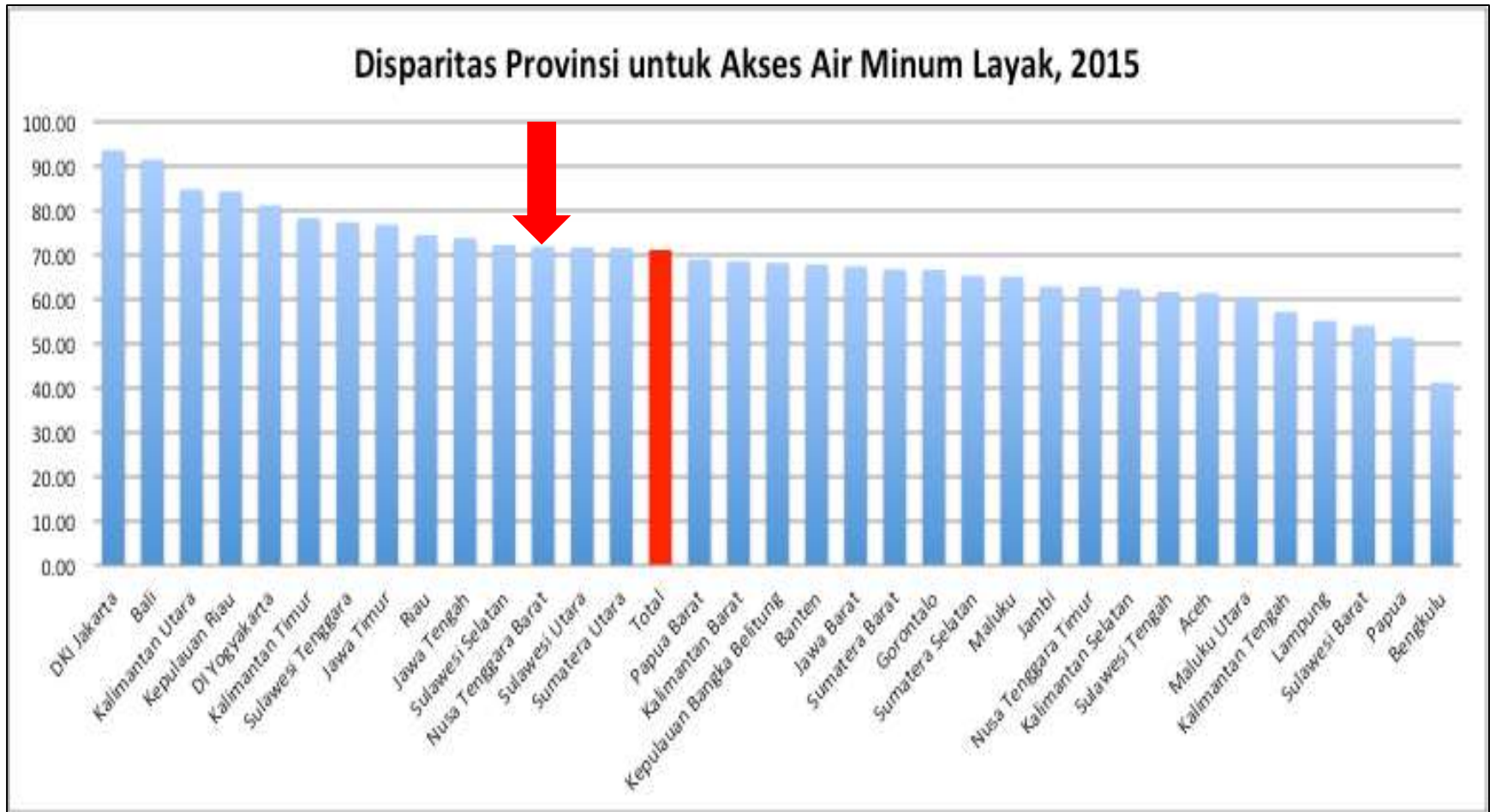


TUJUAN 7: MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikator		Acuan Dasar	Data Terbaru	Target MDGs 2015	Status	Sumber
TUJUAN 7: MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP						
Target 7C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi layak hingga tahun 2015						
7.8	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	37,73% (1993)	70,97% (2015)	68.87%	●	BPS, Susenas
7.8a	Perkotaan	50,58% (1993)	81,30% (2015)	75.29%	●	
7.8b	Perdesaan	31,61% (1993)	60,58% (2015)	65.81%	▼	
7.9	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	24,81% (1993)	62,14% (2015)	62.41%	▼	
7.9a	Perkotaan	53,64% (1993)	76,36% (2015)	76.82%	▼	
7.9b	Perdesaan	11,10% (1993)	47,84% (2015)	55.55%	▼	

Status : ● Sudah Tercapai ▼ Tidak Tercapai

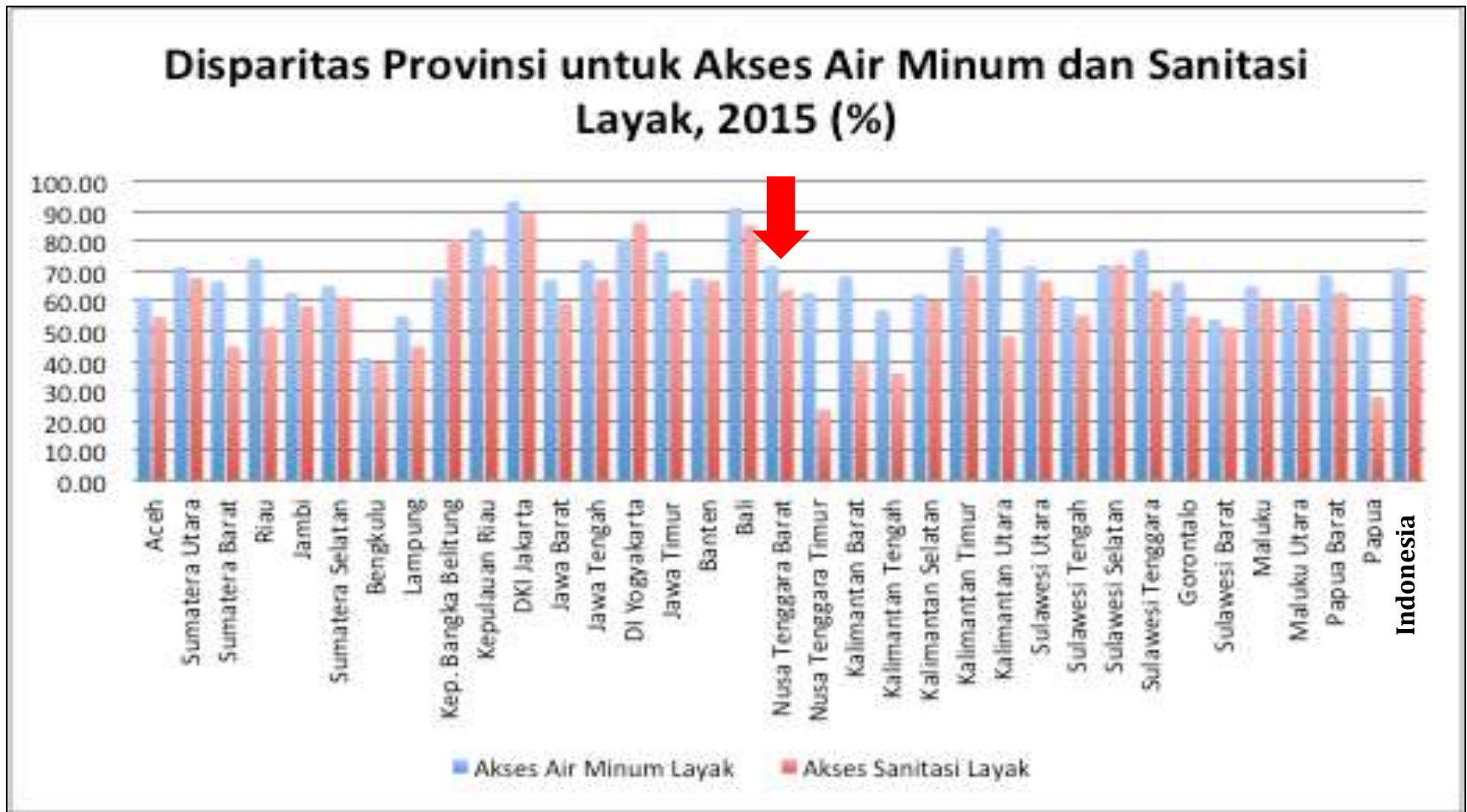
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Tahun 2015



Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Sanitasi Dasar Tahun 2015



Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum dan Sanitasi Dasar Tahun 2015



LESSONS LEARNED MDGs

LEGAL ASPEK

1. Inpres No. 3 Tahun 2010
2. Tim Koordinasi Percepatan Pencapaian MDGs Nasional 2011-2015
3. Surat Edaran Menteri PPN dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 0068/M.PPN/02/2012 dan Nomor: 050/583/SJ
4. Peraturan Gubernur tentang Percepatan RAD MDGs Provinsi 2011-2015
5. Peraturan Bupati dan Walikota tentang Percepatan RAD MDGs Kabupaten dan Kota

PERENCANAAN

1. Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium di Indonesia Tahun 2010-2015
2. Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah (RAD MDGs) 2011-2015
3. Pedoman Review RAD MDGs Provinsi
4. RAD MDGs Provinsi
5. Pedoman Teknis Definisi Operasional Indikator MDGs
6. Pedoman Harmonisasi Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dalam Percepatan Pencapaian Sasaran MDGs
7. Pedoman Penyusunan Rencana Aksi MDGs Kabupaten Kota
8. Penyusunan Database MDGs

LESSONS LEARNED MDGs (Cont...)

IMPLEMENTASI

1. Laporan Pencapaian Tujuan MDGs Nasional Tahun 2010, 2011, 2013 dan 2014
2. Laporan Pencapaian Tujuan MDGs Provinsi Tahun 2013
3. Rencana Aksi MDGs Acceleration Frame Work (MAF) :
 - AKI (Provinsi Jateng, Banten, Jatim)
 - HIV dan AIDS (Provinsi Kepulauan Riau)
 - Air Minum Layak (Provinsi NTB)
 - Sanitasi Layak (Provinsi Bengkulu)

MONITORING DAN EVALUASI

1. Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan MDGs
2. Pedoman Penyusunan Laporan MDGs Provinsi
3. Pedoman Pemberian Insentif bagi Daerah Untuk Pencapaian Sasaran MDGs
4. Laporan Pencapaian Tujuan MDGs Nasional
5. Laporan Pencapaian Tujuan MDGs Provinsi
6. Website MDGs Indonesia
7. E-Monev MDGs
8. Data Indikator MDGs Kabupaten Kota Tahun 2011-2013
9. Diseminasi Informasi MDGs (Radio Talk Show, TV Talk Show, dan Media Visit)

TANTANGAN MDGS

1. Masih adanya kesenjangan yang cukup lebar dalam pencapaian MDGs antarprovinsi dan antarkabupaten/kota serta antartingkat sosial ekonomi
2. Masih terbatasnya sumberdaya terutama yang berasal dari non Pemerintah
3. Masih belum termobilisasinya sumberdaya yang berasal dari dunia usaha, masyarakat, termasuk kerjasama dengan mitra pembangunan
4. Di tingkat daerah belum seluruh indikator MDGs terintegrasi pada sistem perencanaan dan penganggaran jangka pendek maupun jangka menengah
5. Masih belum lengkapnya database indikator MDGs di tingkat kabupaten dan kota
6. Masih perlu diperkuatnya strategi komunikasi dan advokasi MDGs terhadap berbagai stakeholders baik di pusat maupun di daerah

II. DARI MDGs MENUJU SDGs

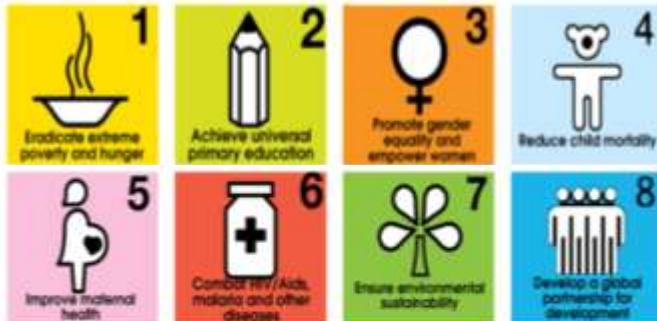
Dari MDGs Menuju TPB/SDGs (1)

- a. Indonesia telah melaksanakan berbagai kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai sasaran MDGs.
- b. Beberapa agenda MDGs belum tercapai akan dilanjutkan dalam TPB/SDGs 2015 – 2030.
- c. TPB/SDGs telah disepakati dalam SU PBB, bulan September 2015 mencakup 17 tujuan 169 target dan 241 indikator.
- d. Indonesia, atas arahan Presiden telah melakukan persiapan untuk implementasi TPB/SDGs.

Dari MDGs Menuju TPB/SDGs (2)

2016-2030

2015
MILLENNIUM
DEVELOPMENT
GOALS



**Sustainable
Development
Goals**



Capaian MDGs dan *Unfinished Agenda*

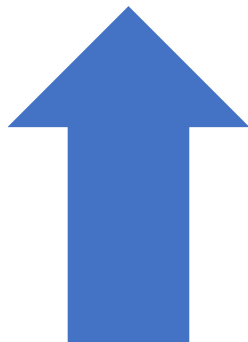
Capaian Indonesia pada 2015:
Dari 8 tujuan, 18 target dan
67 indikator MDGs



**18 Belum
Tercapai**



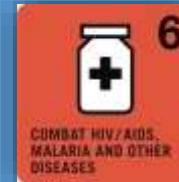
49 Tercapai



1. Penduduk Miskin
2. Gizi & Asupan Kalori



Angka Kematian Ibu (AKI)



Prevalensi HIV dan AIDS



1. Tutupan Kawasan Hutan
2. Emisi CO2
3. Air Minum Perdesaan
4. Sanitasi Layak
5. Kawasan Kumuh Perkotaan



1. Rasio Ekspor & Impor Terhadap PDB
2. Akses Internet

TPB/SDGs Untuk Menyempurnakan MDGs

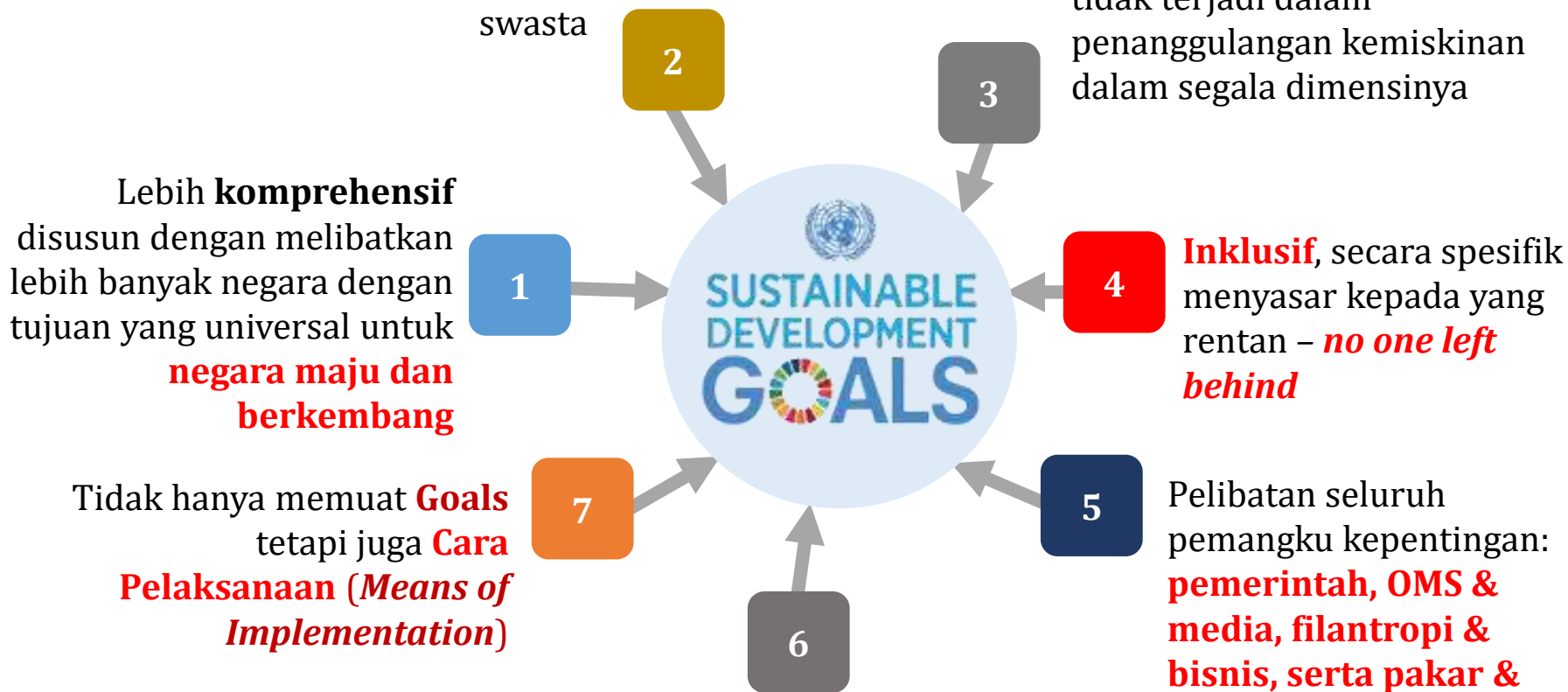
Memperluas sumber **pendanaan**, selain bantuan negara maju juga sumber dari swasta

Menekankan pada **hak asasi manusia** agar diskriminasi tidak terjadi dalam penanggulangan kemiskinan dalam segala dimensinya

Lebih **komprensif** disusun dengan melibatkan lebih banyak negara dengan tujuan yang universal untuk **negara maju dan berkembang**

Tidak hanya memuat **Goals** tetapi juga **Cara Pelaksanaan (Means of Implementation)**

MDGs hanya menargetkan pengurangan “setengah”, SDGs menargetkan untuk menuntaskan seluruh indikator → **“Zero Goals”**



Prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs

Universal

- Dilaksanakan oleh dunia terkait dengan tujuan dan sasaran yang transformatif, berpusat pada manusia, komprehensif, dan berjangka panjang

Integration

- Dilaksanakan secara terintegrasi pada semua dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan (saling terkait)

No-One Left Behind

- Dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan
- Memberi manfaat bagi semua terutama yang rentan

Goals dalam TPB/SDGs 2015-2030

NO	TUJUAN
	Tanpa Kemiskinan
	Tanpa Kelaparan
	Kehidupan Sehat dan Sejahtera
	Pendidikan Berkualitas
	Kesetaraan Gender
	Air Bersih dan Sanitasi Layak
	Energi Bersih dan Terjangkau
	Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi
	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur

NO	TUJUAN
	Berkurangnya Kesenjangan
	Kota & Permukiman yang Berkelanjutan
	Konsumsi & Produksi yang Bertanggung Jawab
	Penanganan Perubahan Iklim
	Ekosistem Lautan
	Ekosistem Daratan
	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Target dan Indikator TPB/SDGs dalam SDGs Indonesia



17 Goal, 169 Target, 241 Indicator

PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL

5 Goal, 47 Target, 77 Indikator



Goal 1: Tanpa Kemiskinan;



Goal 2: Tanpa Kelaparan;



Goal 3: Kehidupan Sehat & Sejahtera;



Goal 4: Pendidikan Berkualitas;



Goal 5: Kesenjaraan Gender;

PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI

5 Goal, 54 Target, 72 Indicators



Goal 7: Energi Bersih & Terjangkau;



Goal 8: Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi



Goal 9: Industri, Inovasi & Infrastruktur;



Goal 10: Berkurangnya Kesenjangan;



Goal 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan;

PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN

6 Goal, 56 Target, 69 Indikator



Goal 6: Air Bersih & Sanitasi Layak;



Goal 11: Kota & Permukiman yang Berkelanjutan



Goal 12: Konsumsi & Produksi yg Bertanggung Jawab



Goal 13: Penanganan Perubahan Iklim;



Goal 14: Ekosistem Lautan;



Goal 15: Ekosistem Daratan;

PILAR PEMBANGUNAN HUKUM & TATA KELOLA

1 Goal, 12 Target, 23 Indikator



Goal 16: Perdamaian, Keadilan & Kelembagaan yang Tangguh

III. KERANGKA PELAKSANAAN SDGs DI INDONESIA

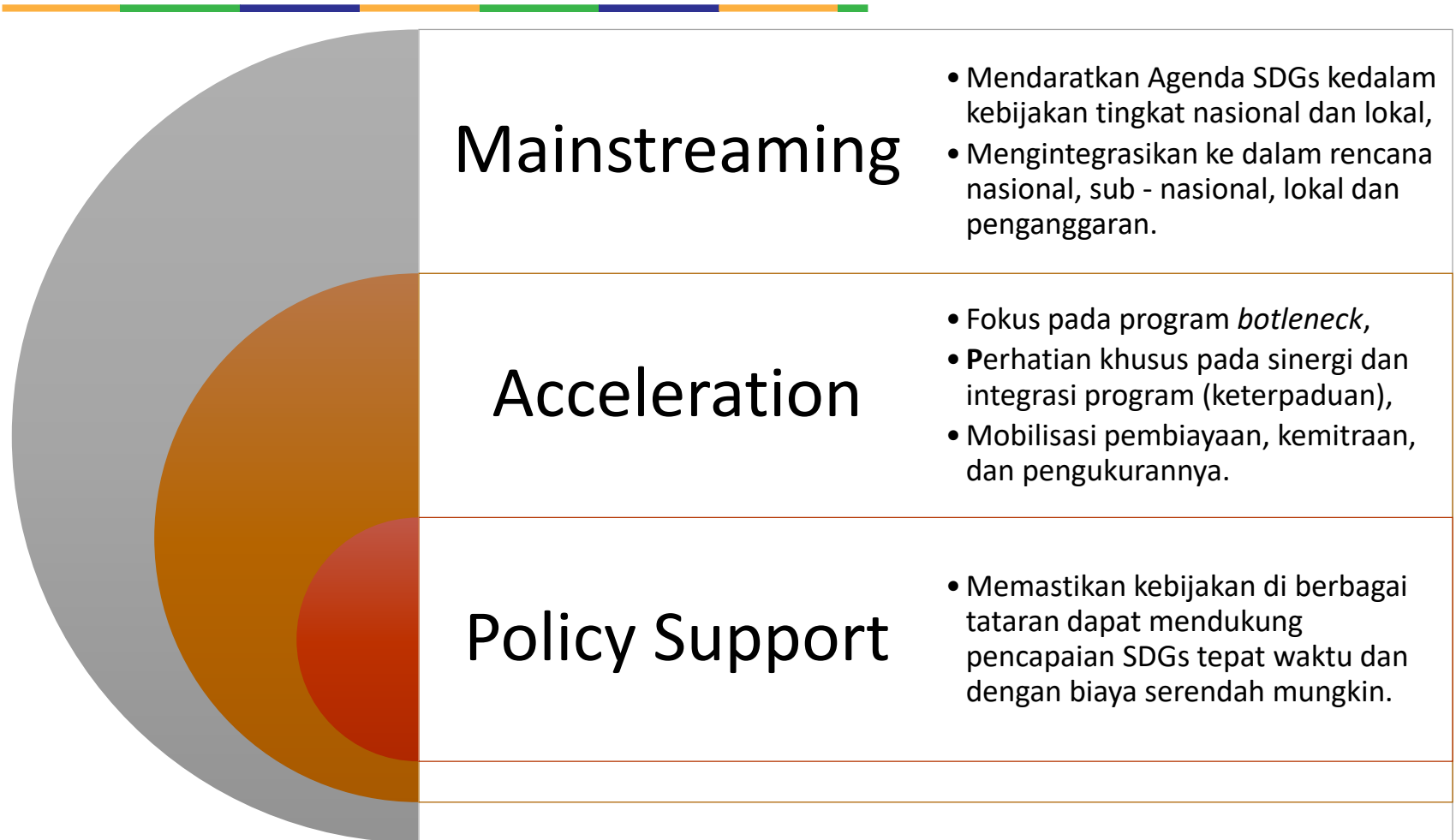
Arahan Presiden Dalam Sidang Kabinet Desember 2015

Pokok Arahan:

1. Mengoptimalkan peran koordinasi Kemen PPN/Bappenas dalam pembangunan, mengingat hampir seluruh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) telah terakomodasi dalam RPJMN;
2. Melibatkan semua pihak (pemerintah, parlemen, OMS & media, filantropi & bisnis, pakar & akademisi) untuk bersinergi sesuai peran, fungsi dan kemampuan para pihak;
3. Kelembagaan bisa langsung bekerja, baik secara strategis maupun operasional;

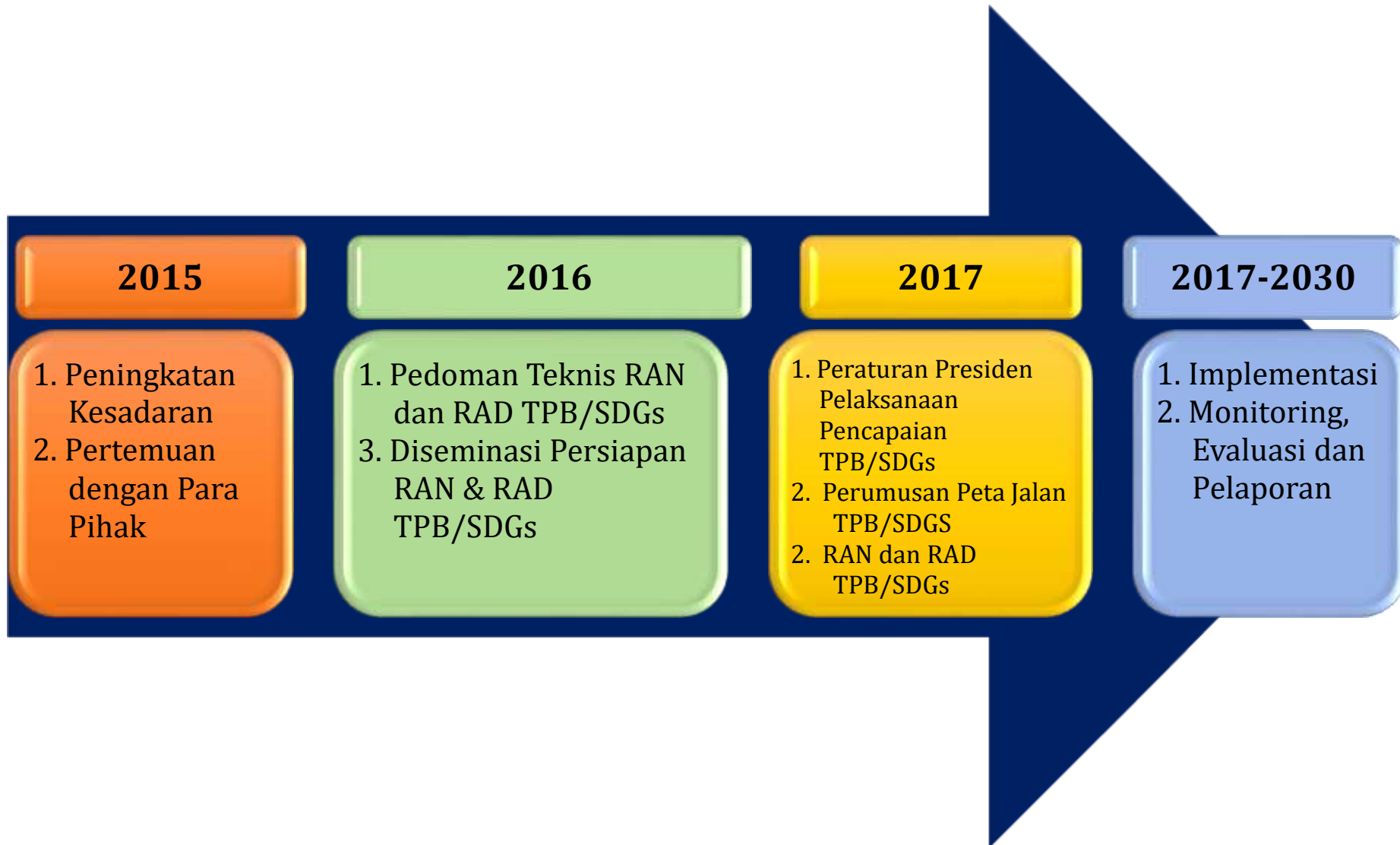
PENDEKATAN MAPS

DALAM IMPLEMENTASI SDGS INDONESIA



FOKUS PADA MEMBANGUN KEMITRAAN, BASIS DATA DAN AKUNTABILITAS

Rencana Pelaksanaan SDGs di Indonesia (*Localizing SDGs*)



**KOORDINASI DAN KEMITRAAN
DENGAN SELURUH PIHAK**

Peran Pemangku Kepentingan

1. Penetapan Indikator
2. Kebijakan & Program
3. Persiapan Data dan Informasi
4. Sosialisasi/Diseminasi, Komunikasi & Advokasi
5. Monev & Pelaporan
6. Dukungan Regulasi & Anggaran

**PEMERINTAH
&
PARLEMEN**

**AKADEMISI
&
PAKAR**

1. Peningkatan Kapasitas
2. Pemantauan dan Evaluasi
3. *Policy Paper/Policy Brief* sebagai dasar *Policy Formulation*

**Implementasi
TPB**

**FILANTROPI
&
BISNIS**

**OMS
&
MEDIA**

1. Advokasi Pelaku Usaha
2. Fasilitasi Program
3. Peningkatan Kapasitas
4. Dukungan Pendanaan

1. Diseminasi dan Advokasi
2. Fasilitasi Program
3. Membangun pemahaman publik
4. Diseminasi dan *Monitoring*

DASAR HUKUM: PERPRES PELAKSANAAN PENCAPAIAN TPB/SDGS

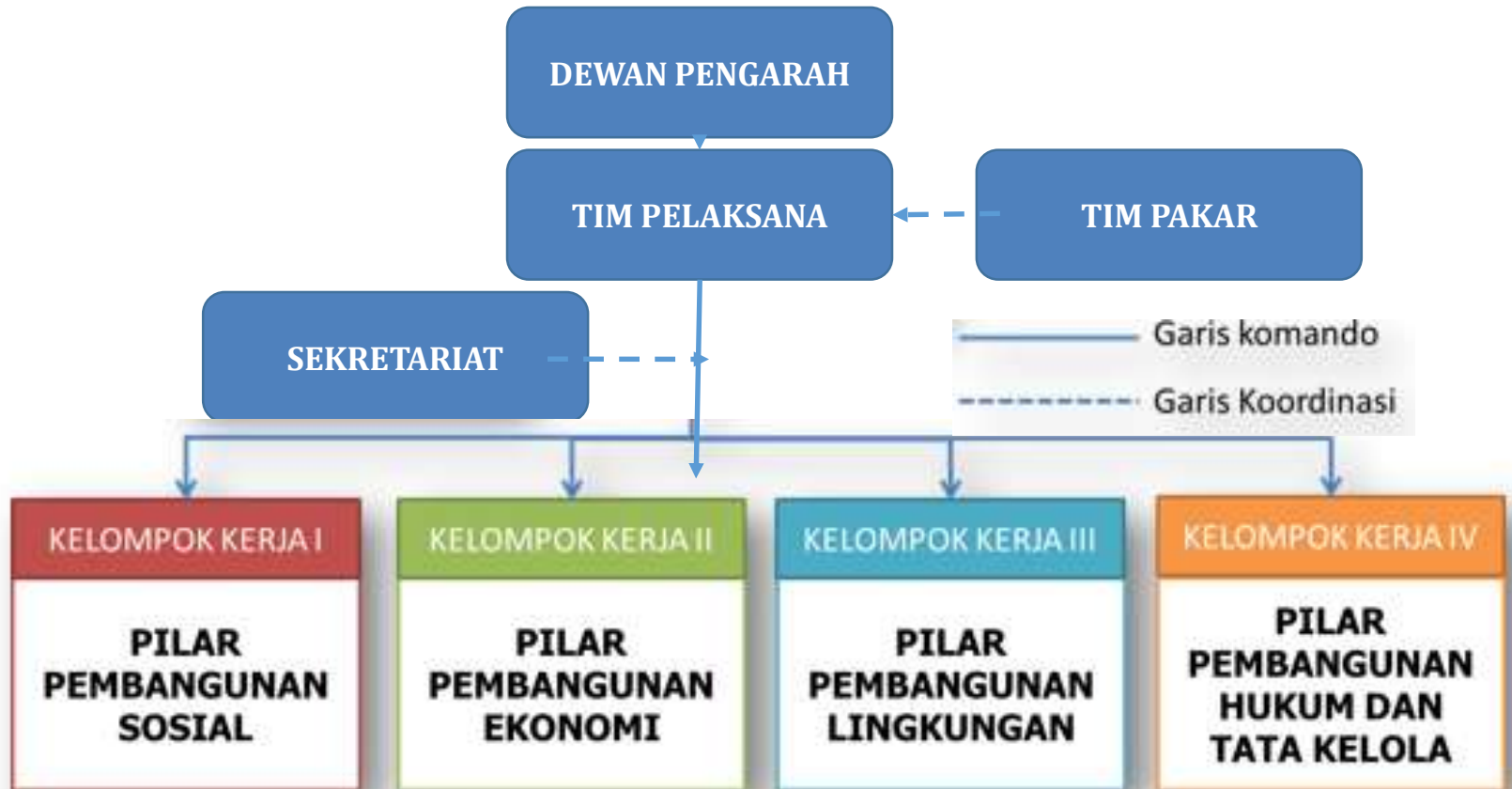
Draft Peraturan Presiden tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan-SDGs

1. Definisi;
2. Sasaran dan Target TPB;
3. Penugasan Kementerian/Lembaga terkait;
4. Struktur Tim Koordinasi Nasional TPB;
5. Keterlibatan para pemangku kepentingan;
6. Peran Pemerintah Daerah;
7. Kaji ulang;
8. Pelaporan;
9. Penganggaran;
10. Lampiran: TPB Indonesia

Draft Tim Koordinasi Nasional SDGs

1. Dalam rangka pencapaian pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional dibentuk Tim Koordinasi Nasional yang terdiri atas: Dewan Pengarah, Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, Dewan Pakar
2. Tim Koordinasi Nasional TPB/SDGs dibantu oleh Sekretariat
3. Penetapan Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, Dewan Pakar ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

TIM KOORDINASI NASIONAL SDGs



**TIM
KOORDINASI
NASIONAL
TPB**

DEWAN PENGARAH

Ketua : Presiden

Wakil Ketua: Wakil Presiden

Wakil Ketua I : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Wakil Ketua II : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Wakil Ketua III : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Wakil Ketua IV : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

Anggota:

1. Menteri PPN/Kepala Bappenas Merangkap Koordinator Pelaksana
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Luar Negeri
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara
6. Sekretaris Kabinet
7. Kepala Staf Kepresidenan

———— **Garis Komando**

- - - - **Garis Koordinasi**

TIM PELAKSANA

Ketua : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas

Wakil Ketua I : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas

Wakil Ketua II : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas

Sekretaris : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas

Anggota :

1. Eselon I Kementerian/Lembaga terkait
2. Filantropi dan Pelaku Usaha
3. Akademisi
4. Organisasi Masyarakat Sipil

TIM PAKAR

SEKRETARIAT

**KELOMPOK KERJA I
PILAR PEMBANGUNAN
SOSIAL**

**KELOMPOK KERJA II
PILAR PEMBANGUNAN
EKONOMI**

**KELOMPOK KERJA III
PILAR PEMBANGUNAN
LINGKUNGAN**

**KELOMPOK KERJA IV
PILAR PEMBANGUNAN HUKUM
& TATA KELOLA**

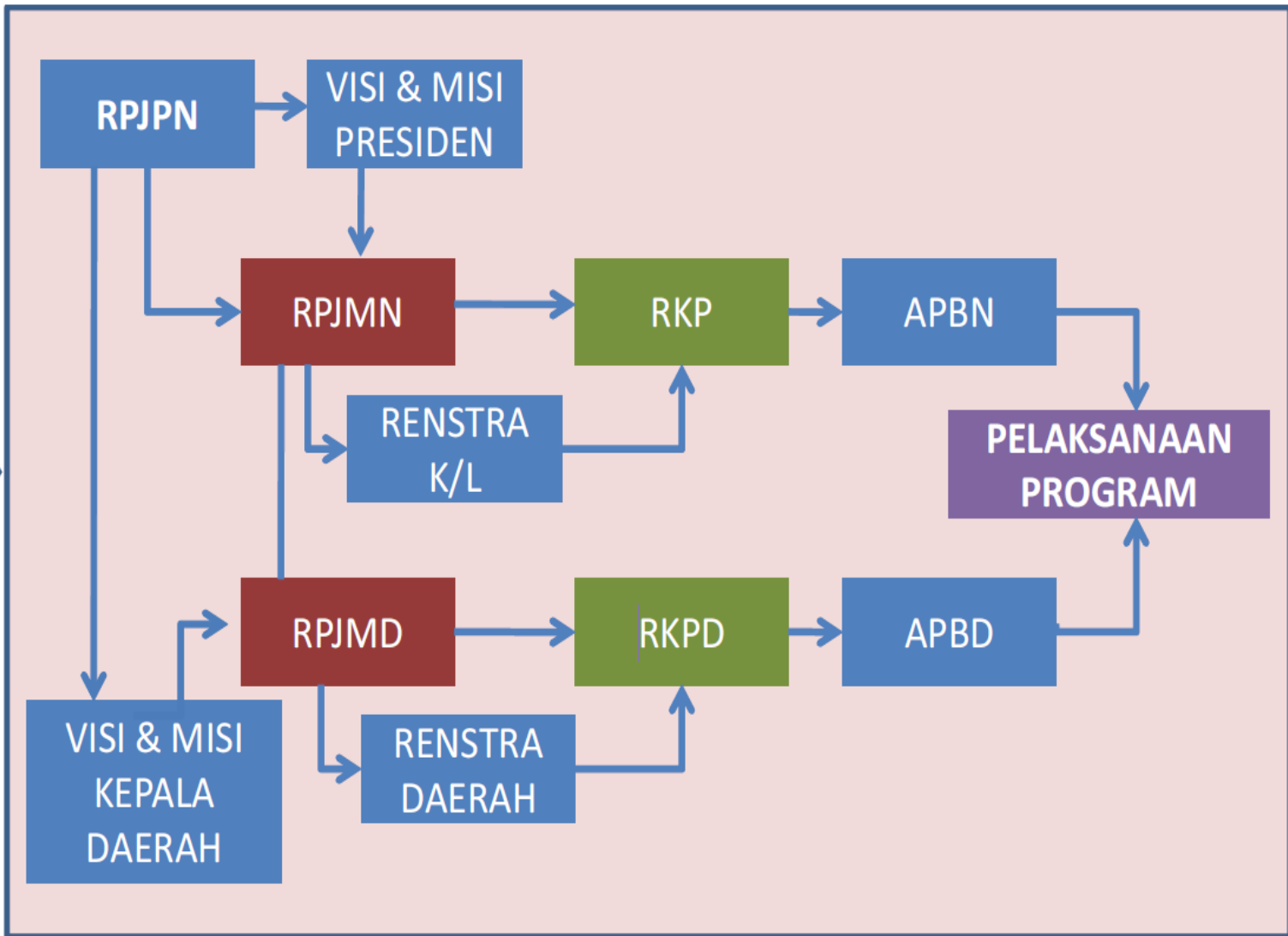
Contoh Lampiran Perpres (TPB Indonesia - Goal 1)

TUJUAN GLOBAL	TARGET GLOBAL	TARGET NASIONAL 2015-2019	INSTANSI TERKAIT
I. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.	1. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.1 Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% (2015: 11,13 %)	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Sosial; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	2. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	2.1 Meningkatnya peserta cakupan jaminan kesehatan nasional melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) pada tahun 2019 menjadi minimal 95% dari total jumlah penduduk (2015: 60%)	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Sosial; Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		2.2 Meningkatnya persentase lanjut usia miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar menjadi 2,28% (2015: 2,24%)	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Sosial; Kementerian Kesehatan; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

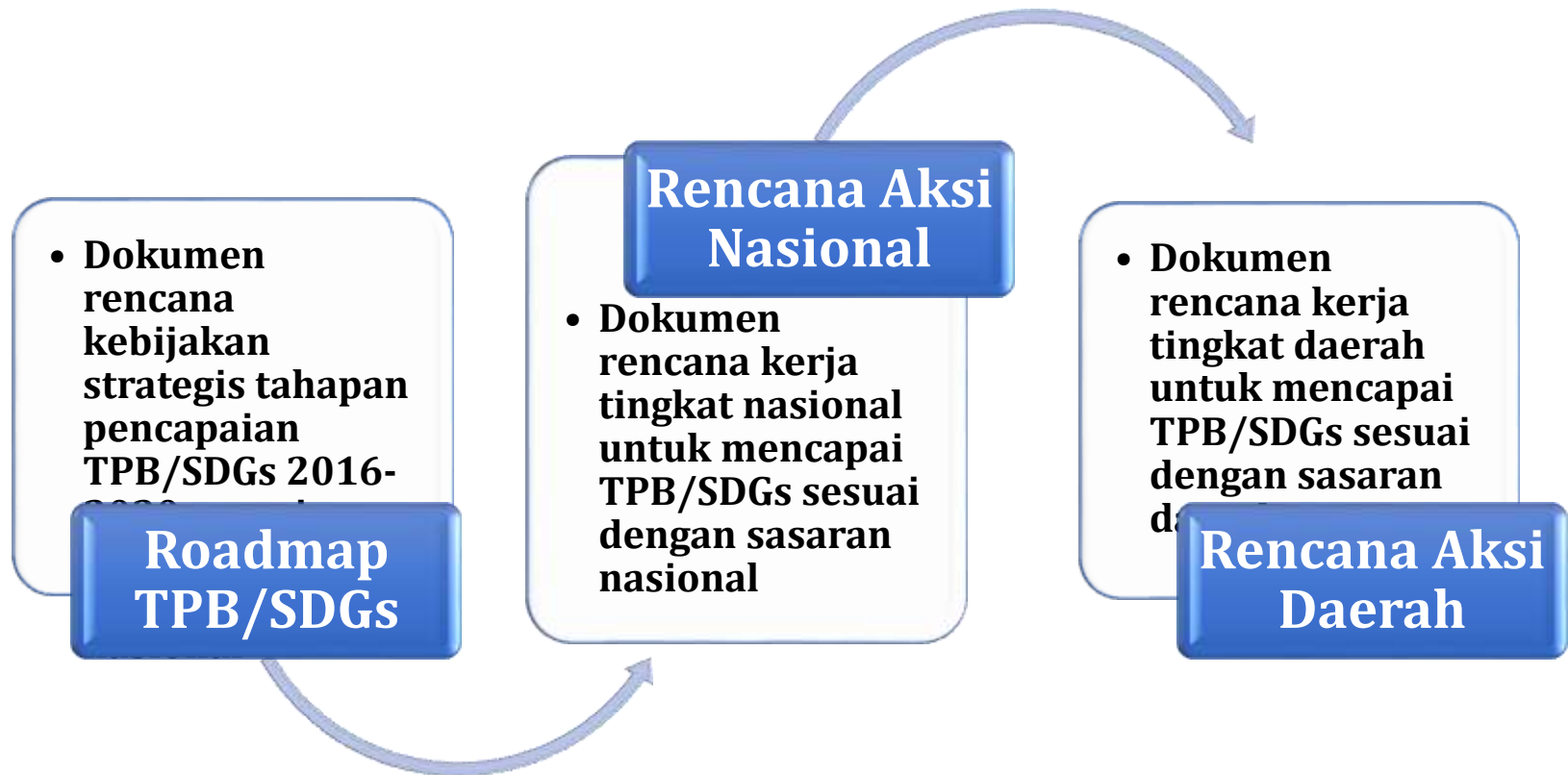
PENGARUSUTAMAAN TPB/SDGS DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH

Integrasi TPB/SDGS dengan Rencana Pembangunan Nasional /Daerah

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGS)



Pengarusutamaan TPB/SDGs



Penetapan Target/Indikator dan Ketersediaan Data Nasional

Penyelerasan target-target SDGs dengan target RPJMN, Renaksi, MDGs, dan Konvensi lainnya

Pengkajian dan pemetaan ketersediaan indikator di tingkat nasional (sesuai dengan RPJMN 2015-2019, Renstra K/L, statistik BPS) serta ketersediaan data dan informasi pendukungnya

Koordinasi dan komunikasi dengan parapihak tingkat nasional dan daerah → untuk verifikasi indikator dan sinergitas program pembangunan

Pemetaan Target/Sasaran TPB/SDGs Dalam

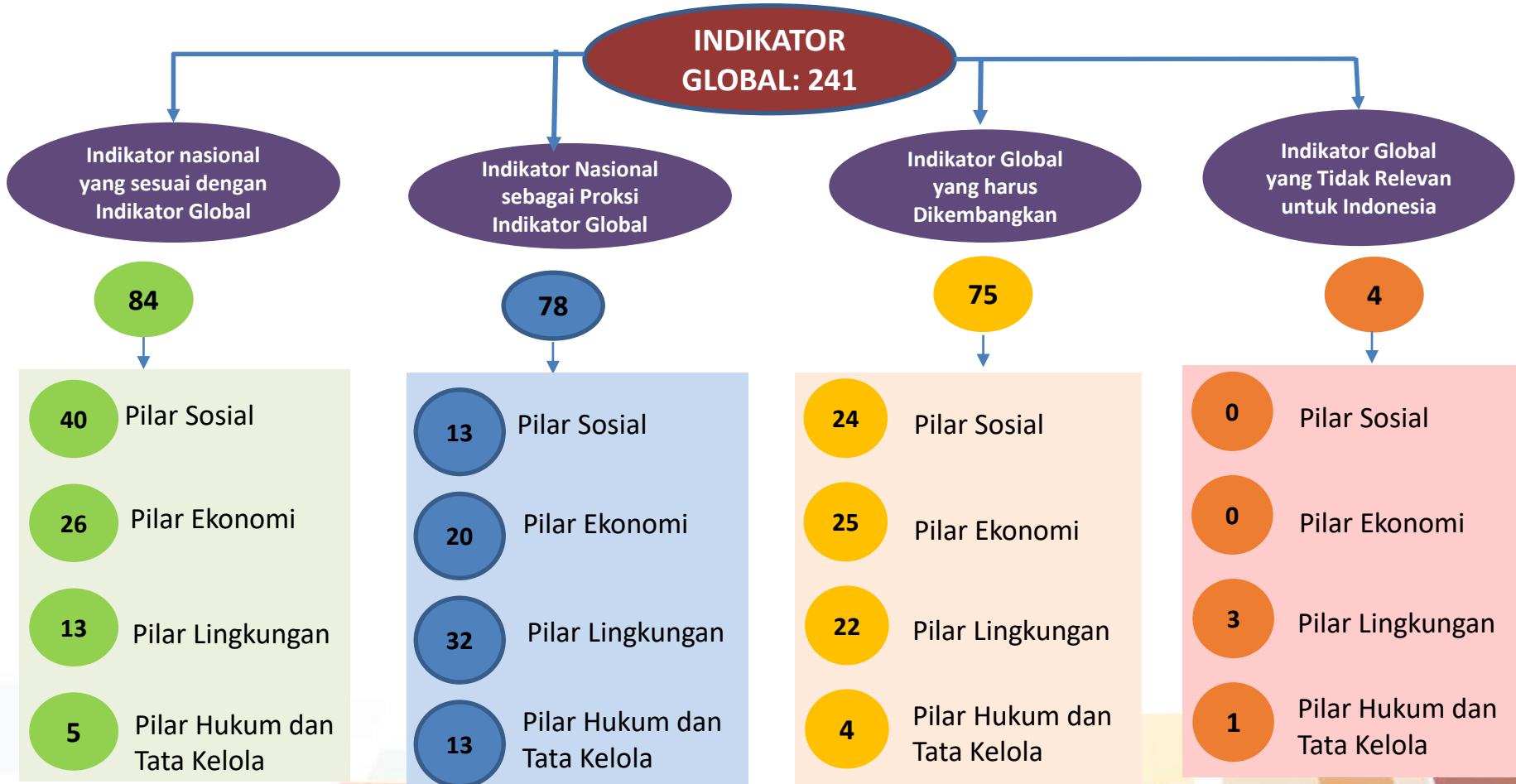
PILAR/GOAL	#TARGET GLOBAL	#TARGET RPJMN 2015-2019	HIGHLIGHT BEBERAPA PRIORITAS NASIONAL (DAFTAR LENGKAP TERLAMPIR)
SOSIAL (1, 2, 3, 4, 5)	47	25	<ul style="list-style-type: none"> • Penanggulangan Kemiskinan • Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat • Peningkatan Kedaulatan Pangan • Pelaksanaan Program Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat • Melindungi Anak, Perempuan dan Kelompok Marjinal
EKONOMI (7, 8, 9, 10, 17)	54	30	<ul style="list-style-type: none"> • Kedaulatan Energi • Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional • Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja • Membangun Konektivitas Nasional • Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah • Pelaksanaan Politik LN Bebas Aktif
LINGKUNGAN (6, 11, 12, 13, 14, 15)	56	31	<ul style="list-style-type: none"> • Ketahanan Air • Membangun Perumahan dan Kawasan Permukiman • Penanganan Perubahan Iklim dan Penyediaan Informasi Iklim dan Kebencanaan → RAN Pengurangan Emisi GRK • Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan • Pelestarian SDA, LH dan Pengelolaan Bencana • Rencana Aksi dan Strategi Keanekaragaman Hayati Indonesia
HUKUM DAN TATA KELOLA (16)	12	8	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kualitas Perlindungan WNI • Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan • Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
TOTAL	169	94	

Pedoman Teknis Metadata Indikator TPB/SDGS

Penting untuk :

1. Penyusunan Peta Jalan, RAN, RAD TPB dibutuhkan persamaan persepsi tentang Tujuan, Target dan Indikator TPB.
2. Mengukur ketercapaian tiap tujuan dan target TPB diperlukan Definisi Operasional (DO) untuk tiap indikator TPB.
3. DO diperlukan untuk pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, serta keterbandingan pencapaian TPB antarnegara dan antardaerah di Indonesia.
4. Beberapa DO dari MDGs masih tetap dilanjutkan dalam pelaksanaan TPB/SDGs, sedangkan beberapa DO yang baru perlu dirumuskan dan disepakati bersama.

Pemetaan Indikator SDGs



Contoh Metadata Indikator Tujuan 1-tanpa Kemiskinan

TARGET 1.2

Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.

INDIKATOR 1.2.1*

Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional.

□

KONSEP DAN DEFINISI

Proporsi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional adalah banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan nasional dibagi dengan jumlah penduduk pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam persentase.

Garis kemiskinan merupakan representase dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya dinyatakan dalam persentase.

Rumus:

$$\text{Proporsi penduduk miskin} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$$

MANFAAT

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran).

Dengan mengkombinasikan status kemiskinan dengan status pekerja konsep dari pekerja miskin tergambarakan. Hal ini bertujuan untuk mengukur berapa pekerja dan pengangguran yang hidup dalam kemiskinan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

BPS melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor.

DISAGREGASI

1. Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota
2. Kelompok umur
3. Jenis kelamin

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Data Susenas dikumpulkan 1 tahun sekali.

Draft Pedoman Rencana Aksi TPB/SDGs Nasional Dan Daerah



PROGRAM PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI TPB

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Ruang Lingkup	2
1.4 Landasan Hukum	3
BAB II KETERKAITAN TPB DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	4
2.1 Keterkaitan TPB dengan RPJMN 2015-2019	4
2.2 Kebijakan RPJMN 2015-2019 dengan TPB	5
BAB III LANGKAH TEKNIS DAN JADWAL PENYUSUNAN RAN TPB	11
3.1 Dokumen yang Perlu Diperhatikan dalam Penyusunan RAN TPB	11
3.2 Langkah-langkah Teknis Penyusunan RAN TPB	13
3.3 Pembiayaan	14
3.4 Jadwal Penyusunan RAN TPB	15
BAB IV SISTEMATIKA RAN TPB	16
4.1 Sistematika Dokumen RAN TPB	16
4.2 Matrik RAN TPB dan Penjabarannya	17
BAB V PENGORGANISASIAN PENYUSUNAN RAN TPB	20
5.1 Pengorganisasian	20
5.2 Uraian Tugas	22
5.3 Mekanisme Kerja	23
BAB VI PENUTUP	24
DAFTAR SINGKATAN	25

iii

*Finalisasi Dan Sosialisasi Akan Dilakukan Sebagai Tindak Lanjut Perpres TPB/SDGs

Sistematika Dokumen Ran TPB/SDGS

BAB I. PENDAHULUAN

- Kondisi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- Permasalahan dan Tantangan

BAB II. ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB

- Uraian tentang Goal, Target dan Indikator TPB
- Kebijakan (uraian per Goal)
- Program dan Kegiatan (uraian per Goal)

BAB III. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

- Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi
- Mekanisme Pelaporan
- Tanggung jawab masing-masing Platform
- Waktu pelaksanaan.

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Perpres (Untuk RAN), Pergub (Untuk RAD)
- Lampiran 2. Format Matriks RAN/D TPB/SDGs
- Lampiran 3. Daftar Tujuan, Target dan Indikator TPB

Contoh Matrik RAN TPB/SDGs (1)

Target TPB (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)				Instansi Pelaksana (5)
			2016	2017	2018	2019	

BAG 1
TARGET DAN INDIKATOR TPB

Nama Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahunan (3)				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
		2016	2017	2018	2019			
PROGRAM PEMERINTAH								
INDIKATOR1								
PROGRAM1								
Kegiatan 1:	1.1. Indikator Kegiatan							
	1.2. Indikator Kegiatan							
Kegiatan 2	2.1. Indikator Kegiatan							
	2.2. Indikator Kegiatan							

BAG 2
PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH

Nama Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahunan (3)				Indikatif Alokasi Anggaran (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Lembaga Pelaksana (7)
		2016	2017	2018	2019				
PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA									
INDIKATOR TPB 1:									
PROGRAM1 :									
Kegiatan 1:	1.1. Indikator Kegiatan:								
	1.2. Indikator Kegiatan:								
Kegiatan 2:	2.1. Indikator Kegiatan:								
	2.2. Indikator Kegiatan:								

BAG 3
PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN OLEH NON PEMERINTAH

IV. RENCANA PELAKSANAAN DAN KELUARAN TPB/SDGS INDONESIA TAHUN 2017

RENCANA PELAKSANAAN TPB/SDGs TAHUN 2017 (1)

1. Penerapan prinsip *no one left behind* dan inklusif untuk memastikan 4 platform terlibat secara aktif dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan TPB/SDGs.
2. Penyelesaian Perpres dan SK Menteri tentang TPB/SDGs
3. Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi baik dengan
 - a. Pemerintah pusat: menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs melibatkan K/L dan 4 platform
 - b. Pemerintah Provinsi : menyusun Rencanan Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs yang melibatkan Kabupaten/Kota dan 4 platform baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota.
4. Pengembangan metadata Indikator TPB/SDGs (metadata tahap I dan II)
5. Pengembangan database TPB/SDGs dan disagregasi (berdasarkan jenis kelamin, kota-desa, kelompok umur, kelompok pendapatan, difabilitas, status migrasi, dll).

RENCANA PELAKSANAAN TPB/SDGs TAHUN

2017 (2)

6. Penyelesaian Roadmap TPPB/SDGs Tahun 2016-2030
7. Koordinasi monitoring dan evaluasi yang melibatkan 4 platform, baik di tingkat Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.
8. Koordinasi penyusunan laporan tahunan capaian TPB/SDGs baik di tingkat Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota yang melibatkan 4 platform.
9. Perumusan laporan SDGs 2016 untuk HLPF
10. Melaksanakan Strategi komunikasi TPB/SDGs : Diseminasi TPB/SDGs bagi masyarakat luas agar memahami manfaatnya dan menjadi bagian pelaksanaan TPB/SDGs dalam kehidupan keseharian
11. Menyelenggarakan dan mengikuti International Workshop terkait SDGs yaitu Goal 14 tentang Ekosistem Laut, Goal 17 tentang Kerjasama Selatan Selatan dan Trianggular, dan Goal 10 tentang Kesenjangan
12. Melakukan kegiatan pengembangan seperti : strategy financing SDGs, KSST, Big Data, Interconnectednes among goals, Big data, dan Pengembangan Governance termasuk Pengelolaan Konflik Kepentingan

RENCANA KELUARAN PELAKSANAAN TPB/SDGs

TAHUN 2017 (1)

1. Penetapan Perpres TPB/SDGs
2. Penetapan SK. Menteri PPN tentang Tim Pelaksana, Dewan Pakar dan Kelompok Kerja Tim Koordinasi Nasional TPB/SDGs
3. Rencana Aksi TPB/SDGs
 - a. Pedoman Penyusunan Renaksi
 - b. Renaksi TPB/SDGs Nasional
 - c. Fasilitasi RAD TPB/SDGs Daerah
4. Pengembangan metadata Indikator TPB/SDGs
 - a. Dokumen metadata tahap I
 - b. Dokumen metadata tahap II (dilaksanakan September 2017)
5. Pengembangan database SDGs
 - a. Database TPB/SDGs (Bersumber data BPS; sektoral; non-state actors)
6. Dokumen Roadmap TPB/SDGs Nasional
7. Pelaksanaan e-Monev TPB/SDGs

RENCANA KELUARAN PELAKSANAAN TPB/SDGs

TAHUN 2017 (2)

8. Laporan tahunan TPB/SDGs
 - a) Pedoman Laporan Tahunan
 - b) Laporan Tahunan TPB/SDGs Nasional
9. Laporan *High-Level Political Forum* (HLPF)
10. Strategi Komunikasi TPB/SDGs
11. Dokumen Strategi Pembiayaan TPB/SDGs (Financing Strategy SDGs)
12. Dokumen Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) SDGs
13. Dokumen Big Data
14. Menyelenggarakan dan mengikuti International Workshop terkait SDGs yaitu Goal 14 tentang Ekosistem Laut, Goal 17 tentang Kerjasama Selatan Selatan dan Trianggular, dan Goal 10 tentang Kesenjangan

TERIMA KASIH

